

**BEKERJA BERSAMA  
MERANGKUL SEMUA**



**Meratus  
Geopark**



**unesco**  
Global Geopark



**Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan  
Nomor 031 Tahun 2025 tentang  
Rencana Strategis Perangkat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2025-2029**

**Tanggal 12 September 2025**

**Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan**

**Tahun 2025 Nomor 31**

# **Rencana Strategis**

**Perangkat Daerah  
Provinsi Kalimantan Selatan**

# **2025-2029**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Pembangunan sektor transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan konektivitas yang efisien dan mendukung perkembangan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur transportasi harus didasari oleh perencanaan yang matang dan terarah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan sebuah perencanaan yang strategis dan terintegrasi melalui tahapan yang terukur dan berkesinambungan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan, serta sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan ramah lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dokumen ini dirancang dengan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya memperhatikan perkembangan kebutuhan transportasi saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang akan datang. Dengan demikian, strategi, kebijakan, dan program yang tercantum dalam RENSTRA ini dilandasi oleh pemikiran yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan masa depan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan sektor transportasi di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada kerjasama dan komitmen semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan bermanfaat dalam mengembangkan sistem transportasi yang lebih baik di daerah ini.

Atas nama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis ini, baik melalui pemikiran, dukungan, maupun sumbangan ide yang sangat berharga. Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan transportasi di Kalimantan Selatan yang lebih maju, aman, dan berkelanjutan.

Banjarmasin, April 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19751102 199412 1 001

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	15
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	20
2.2.1 Kondisi Infrastruktur Perhubungan .....	20
2.2.2 Sumber Daya Manusia .....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan .....	32
2.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan .....	34
2.4.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	36
2.4.2 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja.....	39
2.4.3 Kinerja Anggaran.....	40
2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
2.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan .....	43
2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan .....	45
2.7.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan .....	47
2.8 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	51
2.9 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....	55
2.9.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan .....	56
2.9.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota .....	60
2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	74

2.10.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	74
2.10.2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	76
2.11	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	79
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....		83
3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan .....	83
3.1.1	Tujuan .....	83
3.1.2	Sasaran.....	84
3.1.3	Strategi.....	84
3.1.4	Arah Kebijakan.....	85
3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	87
3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	88
3.4	Penahapan Proyek Strategis Renstra 2026-2029.....	89
3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	93
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		96
BAB V PENUTUP .....		170

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan .....	1
Gambar 2.2 Jaringan Angkutan Feeder/ Pengumpan Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) yang Meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar .....	27
Gambar 3.1.1.1 .....	83
Gambar 3.1 .....	87
Gambar 3.2 .....	87
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan .....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Tipe B .....	20
Tabel 2.2.2 Daftar Jaringan Trayek AKDP Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	21
Tabel 2.2.3 Data Penumpang AKDP Terminal Tipe B 2022 – 2024.....	24
Tabel 2.2.4 Data Koridor dan Sarana Prasarana Bus rapid Transit (BRT).....	25
Tabel 2.2.5 Daftar Jaringan Trayek Angkutan Massal BRT Banjarbakula.....	26
Tabel 2.2.6 Data Produksi Penumpang Angkutan dan Penyebrangan Tahun 2020 s.d 2024 .....	28
Tabel 2.2.7 Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Laut Tahun 2024	29
Tabel 2.2.8 Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Tahun 2020 s.d 2024.....	30
Tabel 2.2.2.1 Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan .....	31
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026.....	33
Tabel 2.4.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PerhubunganProv. Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 .....	34
Tabel 2.4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	35
Tabel 2.4.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kalsel .....	41
Tabel 2.7.1 .....	45
Tabel 2.7.1.1 Analisa SWOT .....	49
Tabel 2.8.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	53
Tabel 2.9.1 (b) Internalisasi dan Dukungan terhadap SDGs.....	55
Tabel 2.9.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan .....	57
Tabel 2.9.1.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan ....	59
Tabel 2.9.2.1 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota.....	60
Tabel 2.10.1.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	75
Tabel 2.10.2.1 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Ekonomi dan Lingkungan Terkait Urusan Perhubungan.....	77

Tabel 2.10.2.2 Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 .....	78
Tabel 2.11.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....	80
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	88
Tabel 3.4 Penahapan Proyek Strategis Renstra 2026-2030.....	89
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD .....	93
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah.....	98
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	103
Tabel 4.3 a Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan.....	134
Tabel 4.3 b Indikator Kinerja Daerah .....	166
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	167
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	168
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.....	169

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 diikuti dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Nomor 100.3.4.1/ 00654/BAPPEDA/2025 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selanjutnya, dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Pada ayat (2) disebutkan juga Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau

lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengakselerasi tahapan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan perhubungan di daerah. Urusan perhubungan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Selanjutnya dalam pasal 273 ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang diseftai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada ayat (4) Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat mampu mawadahi Rencana Strategis Kementerian serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Perangkat Daerah harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasil gunaserta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis 2025-2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 nomor 4);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 s/d 056 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
24. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.4.1/00654/BAPPEDA/2025 tentang Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan urusan Perhubungan selama jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang di wilayah Kabupaten/Kota, wilayah Provinsi maupun wilayah Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
2. Menyusun perencanaan pembangunan perhubungan di Provinsi Kalimantan Selatan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
3. Menyediakan instrumen pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan apa sajakah urusan yang dikelola oleh Perangkat Daerah dan apakah arti penting dari tiap urusan tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bila tidak

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan tentang semua perundang-undangan yang terkait secara langsung dan mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tugas pokok dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tujuan menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Perhubungan dan menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan serta menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, yaitu

:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- d. Tujuan dan sasaran
- e. Strategi dan arah kebijakan
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

## h. Penutup

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asst dan modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (sumber tabel dapat dari LAKIP PD dari lima tahun sebelumnya), menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Gambaran Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan

Menjelaskan tentang perencanaan dan target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 hingga 2029, yang mencakup indikator-indikator utama dan pendukung dalam urusan perhubungan. Isinya merinci tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan layanan transportasi, konektivitas antarwilayah, keselamatan lalu lintas, dan kepuasan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan RKPD dan RPJMD.

#### 2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan bahwa kelompok sasaran pelayanan Dinas Perhubungan mencakup seluruh pihak yang berkaitan dengan transportasi dan lalu lintas. Sasaran utamanya meliputi pengguna jalan, pengusaha transportasi, pemilik kendaraan bermotor, pihak-pihak terkait perizinan dan infrastruktur transportasi, serta pemerintah. Dinas Perhubungan bertanggung jawab memberikan layanan kepada semua pihak tersebut untuk mendukung sistem transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.

#### 2.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Menjelaskan tentang hubungan kemitraan antara perusahaan swasta (PT Bagong) dan instansi pemerintah (Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan) dalam penyelenggaraan layanan transportasi umum. Fokus utamanya adalah pada peran, tanggung jawab, dan bentuk kerja sama antara keduanya untuk mendukung pelayanan transportasi yang aman, teratur, dan sesuai regulasi.

#### 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Menjelaskan tentang identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pelayanan transportasi, meliputi berbagai kendala yang menghambat efisiensi sistem transportasi di suatu wilayah. Permasalahan tersebut mencakup kemacetan lalu lintas, keterbatasan angkutan umum, infrastruktur yang tidak memadai, serta pengelolaan transportasi perairan dan perkeretaapian yang belum optimal. Identifikasi

masalah ini bertujuan untuk memberikan dasar perbaikan dalam meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

#### 2.8 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029, dengan visi "KALSEL BEKERJA: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera". Visi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan keseimbangan antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat lima misi pembangunan, salah satunya fokus pada pembangunan infrastruktur yang handal, terutama dalam sektor transportasi. Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam pengembangan transportasi massal dan infrastruktur terkait. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya kualitas angkutan umum, keterbatasan fasilitas jalan, dan kurangnya integrasi moda transportasi. Faktor pendorong meliputi dukungan kebijakan pemerintah pusat, kerja sama dengan pihak swasta, dan program strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri dan pelabuhan. Tujuan utama RPJMD adalah menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### 2.9 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Menjelaskan tentang bagaimana pemerintah mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Integrasi ini terlihat dari pemetaan program dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator-indikator SDGs tertentu. Misalnya, pada Tujuan 9 yang berfokus pada industri, inovasi, dan infrastruktur, dukungan diwujudkan melalui program pengelolaan pelayaran dan penyelenggaraan

lalu lintas serta angkutan jalan, yang berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi dan pengumpulan data terkait moda transportasi. Sedangkan pada Tujuan 17, yang menekankan pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan, program yang sama juga mendukung pelaksanaan proyek-proyek dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian, paragraf ini menggambarkan bagaimana strategi pembangunan pemerintah telah diselaraskan dengan pencapaian target-target SDGs melalui program-program konkret.

#### 2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Menjelaskan tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan transportasi di Kalimantan Selatan dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029. Fokus utamanya adalah mengkaji kondisi infrastruktur transportasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

#### 2.11 Penentuan Isu-Isu Strategis

Menjelaskan tentang identifikasi dan perumusan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Isu-isu strategis tersebut disusun berdasarkan analisis terhadap visi dan misi kepala daerah, program prioritas, sasaran jangka menengah, serta kondisi aktual pelayanan transportasi yang mencakup aspek darat, air, dan multimoda. Selain itu, dokumen ini juga mempertimbangkan potensi wilayah, permasalahan sektoral, isu-isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta dinamika global, nasional, dan regional yang berdampak terhadap sektor transportasi. Melalui pendekatan ini, isu

strategis seperti keterbatasan angkutan umum, belum terintegrasinya sistem transportasi, rendahnya keselamatan berlalu lintas, hingga kurangnya SDM teknis berhasil dirumuskan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

menjelaskan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Tujuannya adalah meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi berbasis wilayah. Sasaran yang ingin dicapai mencakup peningkatan konektivitas antar kawasan, kinerja layanan transportasi, keselamatan transportasi, serta kualitas pelayanan publik. Strategi yang dirancang meliputi pengembangan sistem transportasi massal berkelanjutan, peningkatan layanan dan infrastruktur transportasi, serta penguatan aspek keselamatan. Arah kebijakan lima tahun ke depan difokuskan pada tiga aspek utama: konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan transportasi, yang disusun selaras dengan RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra  
Menjelaskan keterkaitan antara sasaran dalam RPJMD dan tujuan dalam Renstra di bidang infrastruktur. Misi 2 RPJMD tentang pembangunan infrastruktur yang handal dijabarkan ke dalam tujuan “Industri, Inovasi, dan Infrastruktur” dengan fokus pada peningkatan perekonomian daerah, pemerataan pembangunan, serta mutu layanan sarana dan prasarana.

### 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan teknik perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang mengacu pada sasaran RPJMD dan NSPK yang relevan. Fokus utamanya adalah peningkatan konektivitas transportasi darat dan perairan, keselamatan lalu lintas, serta akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

### 3.4 Penahapan Proyek Strategis Renstra 2026-2030

Memuat rencana kerja bertahap tahun 2026–2030 di sektor transportasi Kalimantan Selatan, mencakup lima bidang utama: angkutan, pelayaran, lalu lintas jalan, terminal tipe B, dan transportasi perkotaan.

### 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

Menjelaskan teknik perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang diselaraskan dengan NSPK nasional dan arah kebijakan RPJMD daerah. Dalam hal ini, NSPK yang menekankan konektivitas transportasi darat dan air diturunkan menjadi arah kebijakan RPJMD berupa peningkatan konektivitas antar kawasan.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Menjelaskan program dan kegiatan serta pendanaan kegiatan sesuai dengan RPJMD untuk mencapai Tujuan, sasaran, indikator, target yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Pada bagian ini rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja' kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, penyajiannya menggunakan [Tabel 6.1](#). yang bersumber dari [Tabel T-C.27](#).

Menjelaskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dengan dilengkapi tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

## BAB V PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memasukkan urusan perhubungan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan perhubungan di daerah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian tugas pokok dan fungsi sebagai dampak penyesuaian urusan/ kewenangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya atas dasar peraturan daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai berikut

- A. Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sedangkan fungsinya adalah :
1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
  2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;

4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan dilaksanakan oleh:

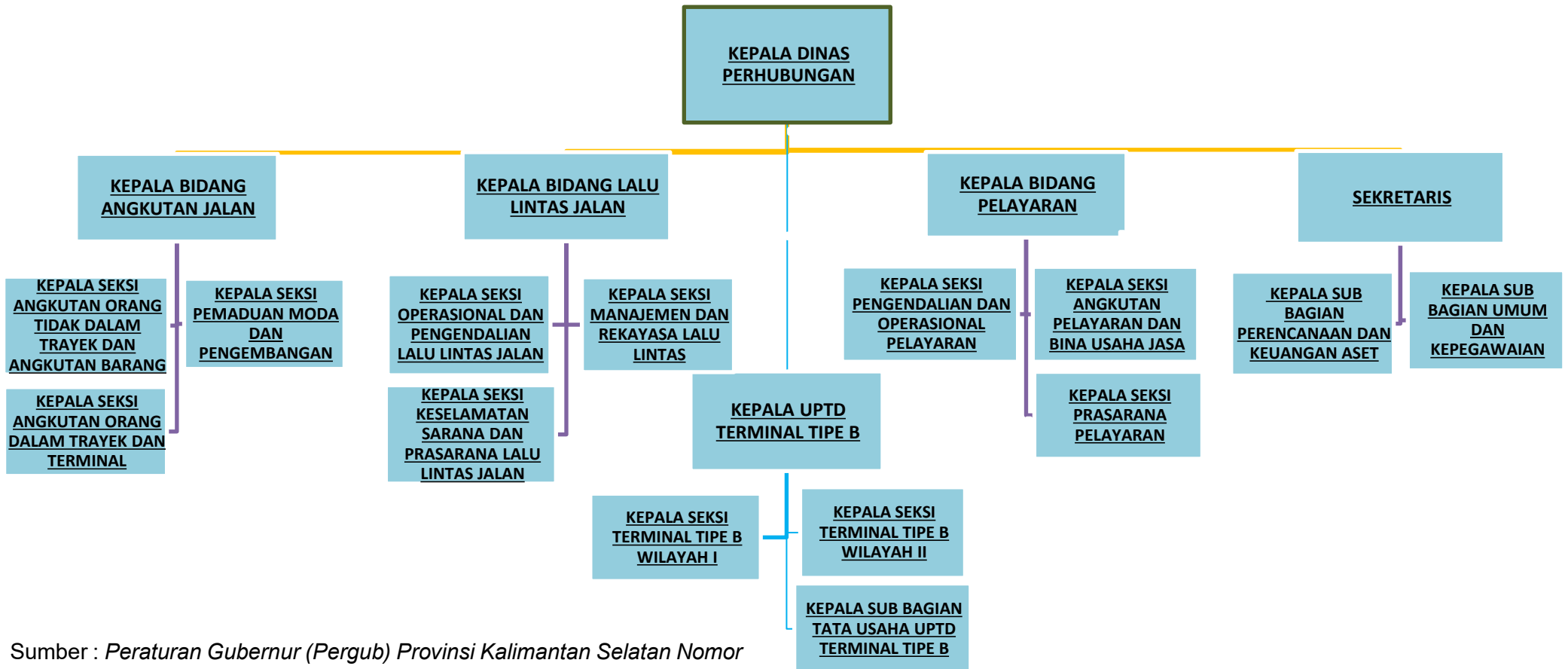
1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris
  3. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
  4. Kepala Bidang Angkutan Jalan
  5. Kepala Bidang Pelayaran
  6. Kepala UPTD
  7. Kelompok Jabatan Fungsional
- B. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dengan fungsi :
1. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  3. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
  4. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  5. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  6. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
  7. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan, dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- D. Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
  2. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
  3. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan;

- E. Bidang Pelayaran mempunyai tugas, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.
- F. Unit Pelaksana Teknis Terminal mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas sedangkan fungsinya adalah:
1. Penyusunan rencana teknis operasional di Terminal
  2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Terminal
  3. Evaluasi dan pelaporan di Terminal
  4. Pengelolaan ketatausahaan dan
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**



Sumber : Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

### 2.2.1 Kondisi Infrastruktur Perhubungan

#### 1. Perhubungan Darat

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No 188.44/0530/KUM/2019 tentang Penetapan Terminal Tipe B di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 5 terminal yaitu terminal kilometer 6 kota Banjarmasin, Terminal Banua Lima di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terminal Mabuun di Kabupaten Tabalong, Terminal Kersik Putih di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Terminal Stagen di Kabupaten Kotabaru.

**Tabel 2.2.1**  
**Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Tipe B**

No	Nama Terminal	Kab / Kota	Kondisi	Status Aset
1.	Km 6	Banjarmasin	Layak Oprasi	Milik Pemprov
2.	Banua Lima	Hulu Sungai Utara	Layak Oprasi	Milik Pemprov
3.	Terminal Mabuun	Tabalong	Layak Oprasi	Milik Pemprov
4.	Kersik Putih	Tanah Bumbu	Layak Oprasi	Milik Pemprov
5.	Terminal Stagen	Kotabaru	Layak Oprasi	Milik Pemprov

Sumber : UPTD TERMINAL TIPE B

Transportasi merupakan sistem pendukung yang menghubungkan berbagai fungsi ruang yang berbeda-beda di tempat yang berbeda pula. Baik fungsi ekonomi, fungsi sosial/budaya, serta fungsi lingkungan. Ketiga aspek ini juga merupakan unsur utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep transportasi yang berkelanjutan pada

akhirnya memang tidak dapat terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Rasio Konektivitas dilihat dari jumlah daerah yang di layani oleh sarana transportasi. Dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0676/KUM/2014 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Operasi Angkutan Orang di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

**Tabel 2.2.2**  
**Daftar Jaringan Trayek AKDP Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
1	2	3	4	5	6
1.	A.01	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Martapura, PP	-	250	Jingga sinar pagi polos
2.	A.02	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Pelaihari, PP	-	100	Kuning polos
3.	A.03	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Land. Ulin, PP	-	150	Atas putih bawah hijau sumatra
4.	A.04	B. Masin (P3A) – Gambut (KM.17), PP	-	125	Atas putih bawah admirablue
5.	A.05	B. Masin (P3A) – Sei Tabuk – Gambut (KM.17), PP	-	50	Atas kuning bawah barollare
6.	A.06	Banjarmasin (KM.6) – Kalampayan, PP	-	50	Kuning polos (taksi yellow)
7.	A.07	B. Masin (Kayu Tangi) – Pulau Bakut – Porwosari – Tamban – Tabunganen, PP	-	50	Atas lacerred bawah kuning
8.	A.08	B. Masin (Trisakti) – Gambut (KM.17), PP	-	100	Biru langit les bawah hitam
9.	A.09	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Kandangan, PP	-	50	Merah 307 les bawah
10.	A.10	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Barabai, PP	-	225	Hijau 940 polos
11.	A.11	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Amuntai – Alabio, PP	-	175	Merah muda metallic les bawah hitam
12.	A.12	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Amuntai – Pasar Panas, PP	50	325	Centareblue metallic polos
13.	A.13	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Barabai – Tanjung, PP	50	450	Silver metallic polos
14.	A.14	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Sungai Danau, PP	-	200	Coklat susu les bawah hitam

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Plafon Bus Umum Yang Dialokasikan		Keterangan/Warna Khusus untuk Minibus Yang Tidak Berjadwal
			Berjadwal	Tidak Berjadwal	
15.	A.15	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Sei Danau – Batulicin, PP	40	300	Atas putih bawah suzuki yellow
16.	A.16	B. MAsin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Serongga, PP	20	50	Atas blue metallic bawah merah
17.	A.17	B. Masin (KM.6) – Gambut (KM.17) – Kotabaru, PP	40	50	Putih polos les bawah hitam
18.	A.18	Rantau – Kandangan, PP	-	100	Atas putih bawah barollared
19.	A.19	Kandangan – Pantai Hambawang – Barabai, PP	30	100	Atas blue mettalic bawah merah
20.	A.20	Barabai – Paringin – Tanjung, PP	-	50	Atas blue green bawah merah 06
21.	A.21	Barabai – Martapura (Cempaka) – Batulicin, PP	30	300	Hijau metallic les bawah hitam
22.	A.22	Barabai - Kandangan – Mawangi – Batulicin, PP	-	100	Atas kuning bawah hijau sumatra
23.	A.23	Amuntai – Pantai Hambawang – Barabai, PP	-	75	Atas coklat susu bawah hitam
24.	A.24	Amuntai – Paringin, PP	-	100	Atas kuning bawah barollord
25.	A.25	Amuntai – Kelua – Pasar Panas, PP	-	100	Atas putih bawah barollared
26.	A.26	Batulicin – Tarjun, PP	-	40	Hijau polos
27.	A.27	Batulicin – Serongga, PP	-	40	Atas putih bawah hijau
28.	A.28	Batulicin – Gunung Batu Besar, PP	-	40	Atas hijau bawah biru
29.	A.29	Batulicin – Sengayam PP	-	40	Atas hijau bawah putih
30.	A.30	Batulicin – Sampanahan, PP	-	40	Atas hijau bawah biru
31.	A.31	Batulicin – Geronggang, PP	-	40	Biru tua polos
32.	A.32	Batulicin – Tanjung Samalantakan, PP	-	40	Biru tua polos
33.	A.33	Batulicin – Sei Durina, PP	-	40	Hijau sumatra polos
34.	A.34	Batulicin – Tanjung Batu, PP	-	40	Putih polos
35.	A.35	Batulicin – Hampang, PP	-	40	Biru laut polos
		<b>JUMLAH</b>	<b>260</b>	<b>4.025</b>	

Sumber data: Bidang Angkutan Jalan Dishub Prov Kalsel tahun 2024

a. Perencanaan Simpul Lalulintas Angkutan Orang

Simpul lalu lintas merupakan unsur pendukung kinerja jaringan baik itu pertemuan antara arus dan pada jaringan dan atau konektivitas antar jaringan sebagaimana hasil analisa maka rencana peningkatan kinerja simpul lalu lintas yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan fasilitas prasarana terminal penumpang angkutan umum tipe B pada tiap kabupaten/kota sebagai simpul konektivitas layanan angkutan umum AKDP;
- 2) Melakukan optimalisasi pelayanan angkutan umum sehingga meningkatkan pemilihan moda simpul split bagi pergerakan orang dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi kendaraan angkutan umum;
- 3) Pembentukan wilayah wilayah aglomerasi untuk penataan angkutan antar kota dalam suatu kawasan sebagai layanan pendukung jalur utama AKDP;
- 4) Merencanakan simpul-simpul yang terintegrasi dengan moda lain.

**Tabel 2.2.3**  
**Data Penumpang AKDP Terminal Tipe B 2022 – 2024**

No.	Tahun	Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)								
		Penumpang				Angkutan Umum				
		Datang (Orang)		Berangkat (Orang)		Datang (Buah)		Berangkat (Buah)		
		Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus	Mini Bus	Bus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Terminal Kersik Putih Batulicin									
1	2019	17,450	-	8,904	-	2,804	-	1,060	-	
2	2020	6,384		2,489		1,760		486		
	Terminal Stagen									
1	2019	5,634	-	4,313	-	358	-	356	-	
2	2020	754	-	778	-	80	-	89	-	
	Terminal Banua Lima Amuntai									
1	2019	11,642	-	39,285	-	682	-	2,772	-	
2	2020	3,982	-	-	-	788	-	-	-	
	Terminal Mambuun Tanjung									
1	2019	2,411	-	2,283	-	1,116	-	829	-	
2	2020	2,434	-	2,479	-	767	-	791	-	
	Terminal Km 6 Banjarmasin									
1	2019	28,840	10,498	29,546	17,440	11,172	1,306	10,471	1,113	
2	2020	26,857	-	49,138	-	3,791	-	4,837	-	
	JUMLAH	106,388	10,498	139,215	17,440	23,318	1,306	21,691	1,113	

Sumber: Bidang Angkutan jalan Dishub Prov Kalsel tahun 2024

b. Perencanaan Jaringan Lalulintas angkutan Barang

Perencanaan jaringan lalu lintas angkutan barang perencanaan peningkatan kinerja jaringan angkutan barang lebih menitik beratkan pada usaha penyediaan jalur lintas utama bagi pergerakan angkutan barang melalui ruas-ruas tertentu sebagai berikut:

- 1) Perubahan lintasan angkutan barang rute Banjarmasin menuju Kalimantan Tengah yang semula melewati jalur dalam Kota Banjarmasin diubah menjadi dua rute pada rute pertama dari Pelabuhan Trisakti melewati Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan menuju Kalimantan Tengah melalui Jalan Gubernur Syarkawi lingkaran Utara pada rute kedua distribusi distribusi barang melalui jalur bir dan bor dan

terkoneksi dengan Jalan Lingkar Dalam Gatot Subroto Trisakti

- 2) Usulan rencana lintasan angkutan barang dari wilayah Banjarbaru Lama menuju Banua 6 yaitu dari Simpang lianggangg melewati ruas Jalan Trikora kemudian melalui jalur lingkaran timur Banjarbaru dan selanjutnya melalui Jalan tembus Mataraman Sungai Ulin rute ini Mengalihkan arus angkutan barang dari dalam Kota Banjarbaru dan CBD Martapura
- 3) Optimalisasi jalur lingkaran pada tiap-tiap Kabupaten yaitu pada jalur lingkaran Rantau - jalur lingkaran barat dan jalur lingkaran kersik putih Batulicin

c. Pelayanan Angkutan Aglomerasi

Pelayanan transportasi yang dikelola oleh dinas perhubungan yaitu Bus Rapid Transit (BRT) dimana Perencanaan Angkutan Masal BRT BanjarBakula Dikembangkan sistem layanan yang selanjutnya pemerintah perlu mendorong beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum penataan trayek angkutan umum dan pengembangan angkutan *feeder* ke pusat-pusat bangkitan dan tarikan perjalanan; pembatasan angkutan pribadi hingga pemberian subsidi angkutan murah oleh pemerintah

**Tabel 2.2.4**  
**Data Koridor dan Sarana Prasarana Bus rapid Transit (BRT)**

Koridor	Klasifikasi dan koridor pengembangan	panjang koridor (km)	Sarana-Prasarana			Sistem Operasi	
			jumlah sarana	jenis sarana	jumlah halte	headway	trip/rit
1	Banjarmasin Tengah (Gubernuran) - Terminal Induk KM. 17 - Banjarbaru	39,7	52	bus besar	51	7	6/3
2	Terminal Induk KM. 17 - Terminal Liang Anggang - Martapura	35,3	32	bus besar	24	10	6/3
3	Terminal Handil Bakti - Banjarmasin Utara -	22,9	38	bus besar	28	7	8/4

Koridor	Klasifikasi dan koridor pengembangan	panjang koridor (km)	Sarana-Prasarana			Sistem Operasi	
			jumlah sarana	jenis sarana	jumlah halte	headway	trip/rit
	Terminal Induk KM. 17						
4	Banjarmasin Barat (Pelabuhan Trisakti) - Terminal Induk KM. 17	20,7	29	bus besar	11	7	10/5
5	Terminal Induk KM. 17 Terminal Liang Anggang - Pelaihari	55,6	20	bus besar	11	15	6/3
6	Terminal Handil Bakti - Sei Gampa - Marabahan	42,1	19	bus sedang	8	15	8/4

Sumber: Bidang angkutan jalan Dishub Prov Kalsel Tahun 2022

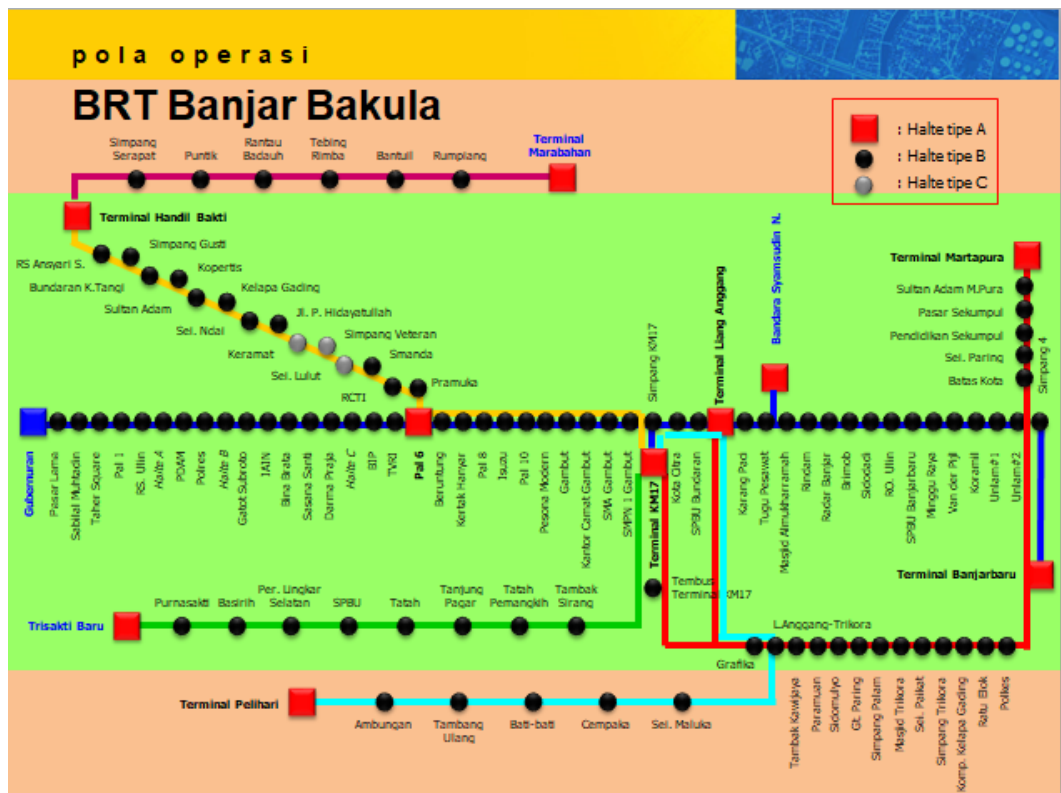
**Tabel 2.2.5**  
**Daftar Jaringan Trayek Angkutan Massal BRT Banjarbakula**

No	Nama Koridor	Rute/Lintasan
1	Koridor 1.A	Term. Km.17 Gambut Barakat - Jl.AYani - Term.Km.6 Banjarmasin - Siring 0 Km, Banjarmasin - Term.Km.6 Banjarmasin - Term.Km 17 Gambut Barakat - Jl. A.Yani – Term Banjarbaru, Maratpura (PP Darussalam), PP.
	Koridor I.B	Term. Km.17 Gambut Barakat - Jl. A. Yani Banjarbaru - Simp. 4 Banjarbaru - Martapura (PP Darussalam) - Simp. 4 Banjarbaru - Jl. A. Yani Banjarbaru - Term. Km. 17 Gambut Barakat - Term. Km.6 Banjarmasin - Siring 0 Km, Banjarmasin - Term. Km.6 Banjarmasin - Term. Km.17 Gambut Barakat, PP
2	Koridor II	Pool BRT Belitung - Term. Km 17 Gambut Barakat - L. Anggang - Simp. 4 (LIK) - Jl. Trikora - Simp. 3 Trikora/Cempaka - Jl. Mistar Cokro Kusumo - Simp. 4 Banjarbaru, PP
3	Koridor III	Term. Km.6 Banjarmasin - Jl. Pramuka - Jl. Veteran - Simpang 4 Gatot - Jl. Syarif Hidayatullah - Jl. Sultan Adam - Jl. Hasan Basri - Handil Bakti (Barito Kuala) - UMB Anjir Muara (Masjid Al Mukarram), PP
4	Koridor IV	Pool BRT Belitung - Jl. P. Hasan Baseri - Handil Bakti - Jl. Trans Kalimantan - (Banjarmasin - Marabahan) - Term. Marabahan, PP
5	Koridor V	Term. Km 17 Gambut Barakat - L. Anggang - Jl. Gubernur Soebarjo - Pelabuhan Trisakti, PP
6	Koridor VI	Term. Km.17 Gambut Barakat - L. Anggang - Jl. A. Yani - Bentok, Bati-Bati - Tambang Ulang - Term. Soemarsono P.A. Ambungan (Pelaihari), PP
7	Koridor VII	Term. Km.17 Gambut Barakat - Simp. 4 S. Tabuk - UMB - Perbatasan (Kalsel-Kalteng) (Anjir Pasar), PP

8	Koridor VIII	Terminal Km.17 Gambut Barakat - Bandara Syamsuddin Noor, PP
9	Koridor IX	Term. Km.6 Banjarmasin - Jl. Pramuka - Jl. Martapura Lama - Sungai Tabuk, PP
10	Koridor X	Simpang 4 Banjarbaru - Jl. PM Noor - Destinasi Wisata (Tahura), PP
11	Koridor XI	Simpang 4 Banjarbaru - Jl. Hos Cokro Kusumo - Destinasi Wisata (Qiram), PP
12	Koridor XII	Banjarbaru - Jl. Mistar Cokro Kusumo - Bentok (Kec. Bati-Bati) Kab. Tanah Laut, PP

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Gambar 2.2 Jaringan Angkutan Feeder/ Pengumpulan Angkutan Massal Bus Rapid Transit (BRT) yang Meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar**



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

d. Simpul Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan

Pemanfaatan potensi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah. Transportasi sungai, danau dan

penyeberangan pernah menjadi moda angkutan utama di Provinsi Kalimantan Selatan, baik untuk mobilitas orang dan barang antar Kecamatan maupun antar Kabupaten/Kota. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan selatan melakukan pengawasan terhadap dermaga penyeberangan antar kota dalam provinsi sebagai table berikut:

**Tabel 2.2.6**  
**Data Produksi Penumpang Angkutan dan Penyeberangan**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

No.	DERMAGA	JUMLAH KAPAL	PENUMPANG					
			2022		2023		2024	
			NAIK	TURUN	NAIK	TURUN	NAIK	TURUN
1	Dermaga Penyeberangan Batulicin	7	516,598	486,708	541,598	504,400	453,566	401,197
3	Dermaga Penyeberangan Alalak	6	243,970	222,392	256,277	238,467	220,662	195,371
4	Dermaga Sungai dan Penyeberangan Banjar Raya	6	215,957	214,493	250,980	249,950	179,393	178,815
5	Dermaga Sungai Pasar Baru	5	8,116	6,919	6,634	5,226	6,120	5,260
6	Dermaga Sungai Pasar Lima	8	36,512	29,997	17,890	10,837	13,322	6,975
7	Dermaga Ujung Murung	3	8,043	4,510	6,415	3,458	4,696	2,547
<b>TOTAL</b>			<b>1,029,196</b>	<b>965,019</b>	<b>1,079,794</b>	<b>1,012,338</b>	<b>877,759</b>	<b>790,165</b>

Sumber: Bidang pelayaran Dishub Kalsel

## 2. Perhubungan Laut

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- a. Untuk meningkatkan akses antara pusat pelayanan yang satu dengan lainnya
- b. Mengefektifkan terbentuknya struktur tata ruang wilayah

- c. Mengoptimalkan jangkauan pelayanan pusat mengembangkan provinsi terhadap wilayah pelayanannya
- d. Menjangkau dan membuka kawasan potensial untuk mengembangkan budidaya yang selama ini terisolir
- e. Meningkatkan interaksi dan sirkulasi masyarakat dari kegiatan perekonomian

Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan bongkar muat barang naik turun penumpang dan keluar masuk kapal dalam dan luar negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilayani oleh 4 penyelenggara pelabuhan yang terdiri atas:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas 1 Banjarmasin
- b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas III Kotabaru
- c. Kantor unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas 3 Kintap
- d. Kantor unit penyelenggara Pelabuhan UPP kelas 3 Satu

Untuk melihat kebutuhan bongkar muat dapat Lebih detail terkait *Load Factor* LF atau tingkat keterisian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.7**  
**Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan Laut Tahun 2024**

RUAS TRAYEK	PENUMPANG		BARANG		LOAD FACTOR (%)
	TURUN (org)	NAIK (org)	BONG KAR (Ton)	MUAT (Ton)	
Batulicin - Kotabaru	3.254	3.254	254	254	11,24
Batulicin - Marabatuan	5.084	5.084	329	329	17,56
Marabatuan - Maradapan	544	544	18	18	1,88

Maradapan - Matasiri	864	864	25	25	2,99
Kotabaru - Majene	12.050	12.050	5.238	5.238	41,63
<b>TOTAL</b>	<b>21.962</b>	<b>21.962</b>	<b>5.866</b>	<b>5.866</b>	<b>15,06</b>

Sumber: Bidang Pelayaran Dishub Prov Kalsel 2024

Pemanfaatan jasa angkutan laut perintis di Provinsi Kalimantan Selatan (Trayek R-12) meningkat pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Ini dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel 2.2.8**  
**Data Jumlah Penumpang dan Barang Angkutan**  
**Tahun 2020 s.d 2024**

TAHUN	PENUMPANG		BARANG	
	TURUN (org)	NAIK (org)	BONGKAR (Ton)	MUAT (Ton)
2020	21.796	21.796	5.864	5.864
2021	26.449	26.449	4.600	4.600
2022	37.243	37.243	1.008	1.008
2023	37.649	37.649	484	484
2024	27.529	27.529	387	387

Sumber: Bidang Pelayaran Dishub Prov Kalsel 2024

1. Saat ini, selain Trayek R-12, masyarakat Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu juga dilayani angkutan laut perintis Trayek R-17 yang berpangkal di Pelabuhan Surabaya.
2. Pada penyelenggaraan tahun 2024, *Load Factor* (LF) rata – rata seluruh ruas trayek adalah 15,06 %, sedangkan LF terbesar berada pada ruas trayek Kotabaru - Majene yaitu 41,63 %. Ruas trayek lain yang berada diatas rata – rata adalah ruas trayek Batulicin – Marabatuan dengan LF sebesar 17,56 %. Terjadi peningkatan jumlah barang yang diangkut sebesar 27,48 % dari tahun sebelumnya, namun demikian jumlah penumpang terjadi penurunan sebesar -17,59 % diakibatkan pandemi Covid-19.
3. Penggunaan sistem jaringan pada pelabuhan singgah di Kecamatan Pulau Sembilan (Pulau Marabatuan, Maradapan dan Matasirih) pada tahun 2020 merupakan pilihan satu-satunya,

namun demikian pembangunan Pelabuhan Marabatuan dan Matasiri telah selesai dan diujicoba pada Bulan Agustus 2020. Pada tahun 2021 bongkar muat serta turun naik penumpang sudah bisa dilakukan di pelabuhan–pelabuhan tersebut. Untuk Pulau Maradapan penggunaan sistem rede tetap dilakukan dan diharapkan kedepannya Pemerintah (Kementerian Perhubungan) dapat membangun pelabuhan di Pulau tersebut.

4. Pengadaan jasa angkutan laut perintis untuk trayek R-12 masih sangat diperlukan masyarakat Kabupaten Kotabaru khususnya Kecamatan Pulau Sembilan dan Kabupaten Tanah Bumbu untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan dan sumber daya laut serta memenuhi kebutuhan hidup yang hanya bisa diperoleh dari daerah yang sudah maju yaitu Batulicin dan Kotabaru. Selain itu, angkutan laut perintis sangat diperlukan sebagai sarana mobilisasi penduduk guna keperluan pendidikan dan juga untuk waktu tertentu diperlukan pemerintah dan elemen masyarakat lain guna keperluan distribusi logistic bencana, pemilu dan penelitian.

## 2.2.2 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 78 dan Pegawai Non PNS sebanyak 146 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2.1**  
**Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**

Unit Kerja	Go IV	Gol III	Gol II	Gol I	Pegawai Non PNS	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1 Orang

Sekretaris / Kepala Bidang	4	-	-	-	-	4 Orang
Bidang Pelayaran	2	9	1	-	20	32 Orang
Bidang Lalu Lintas Jalan	2	9	6	-	17	34 Orang
Bidang Lalu Lintas Angkutan	-	8	1	-	60	69 Orang
UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan	-	9	14	1	48	72 Orang
<b>Sub Total</b>						<b>212 Orang</b>

Sumber: Sekretariat Dinas Perhubungan Prov Kalsel 2024

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan

Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang masuk kedalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan, yang pertama adalah kinerja yang ditetapkan saat Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan, kemudian terjadi perubahan indikator pada tahun 2022 karena terjadi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021 -2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	satu an	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Transportasi	%	81.15	81.3	81.5	90	N/A	N/A	81.15	78.9	85	88.12	N/A	N/A
2	Rasio konektivitas provinsi	%	0.5987	0.59	0.61	0.63	N/A	N/A	0.5987	0.603	0.603	0.649	N/A	N/A
3	On time performance layanan transportasi ( Darat dan Air)	%	0.166	58.5	58.5	59	N/A	N/A	0.166	75.5	55.5	68.35	N/A	N/A
4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dengan kematian per 100.000 keberangkatan	%	0	2.65	2.6	1.6	N/A	N/A	2	3.075	0 (Zero)	0	N/A	N/A

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

## 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan kondisi awal Tahun 2024 dan target kinerja selama 5 tahun mendatang yang sesuai RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Prov. Kalsel**  
**Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Konektivitas Provinsi	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
2	Ontime Performance Layanan Transportasi	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5	61.5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	77.5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2	82.2
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0	0

Sumber: Hasil proyeksi, 2024

Selain indikator Kinerja Utama yang telah dimuat pada tabel di atas, terdapat beberapa indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada kewenangan urusan Perhubungan. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan yang dilengkapi target mulai tahun 2025 sampai dengan 2029.

**Tabel 2.4.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>II</b>	<b>Indikator Sasaran:</b>							
1	Rasio Konektivitas	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.67	0.67
2	Ontime Performance Layanan Transportasi	34	58.5	58.5	59.0	60.0	61.5	61.5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Trnsportasi	77.5	81.3	81.5	81.7	82.0	82.2	82.2
4	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 100.000 keberangkatan	2.73	2.65	2.6	1.6	0.75	0	0
<b>III</b>	<b>Indikator Program:</b>							
1	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	19.5%	20%	30%	40%	50%	60%	60%
2	Presentase Terangkutnya Penumpang dan Barang	65%	67.5%	70%	72.5%	75%	77.5%	77.5%
3	Presentase Pengguna Jalan Yang Melanggar Lalulintas	2.75%	2.65%	2.60%	2.50%	2.25%	2.00%	2.00%
4	Persentase Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan Antar Kota dan Kabupaten dalam Provinsi yang Beroperasi	40%	40%	40%	40%	60%	60%	60%
5	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	0	0	0	100%	100%	100%	100%
<b>IV</b>	<b>Indikator Kegiatan:</b>							
1	Presentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang dengan Kebutuhan Perlengkapan Jalan Provinsi	17.5%	18.5%	20%	22%	25%	27%	27%
2	Presentase Sarana dan Prasarana Terminal tipe B yang memenuhi Standar	20%	20%	20%	60%	60%	100%	100%
3	Presentase Ruas Jalan Provinsi yang dilakukan manajemen dan rekayasa	20%	25%	30%	35%	40%	40%	40%
4	Presentase jumlah dokumen andalalin yang diterbitkan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
5	Presentase pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Presentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang tersedia	0.11%	46.46%	53.54%	64.65%	78.79%	79%	79%
7	Presentase Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Dalam Provinsi	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
8	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase data Lintas Penyeberangan dan Kapal Angkutan Penyeberangan antar Kota/Kab dalam Provinsi yang beroperasi	40%	40%	40%	60%	60%	60%	60%
10	Persentase Badan Usaha Jasa Terkait Angkutan Perairan yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi sesuai standar	20.50%	23.07%	23.07%	25.64%	25.64%	25.64%	25.64%

Sumber: Hasil Analisis 2024

#### 2.4.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 telah disusun indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026

##### a. Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum

Terhadap Frekuensi Perjalanan Penggunaan transportasi pribadi di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dikurangi untuk mengatasi masalah kecelakaan dan kemacetan, salah satunya dengan menggunakan transportasi umum dalam melakukan perjalanan. Ada dua jenis transportasi umum di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu transportasi umum konvensional dan transportasi umum online. Pemilihan transportasi umum dapat dipengaruhi oleh beberapa kriteria, yaitu kriteria aman, nyaman, biaya, waktu, dan kemudahan. Hasil survei dan hasil pengolahan data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process menunjukkan bahwa kriteria aman menjadi prioritas masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan bobot sebesar 27,5%, kemudian kriteria nyaman (20%), kriteria waktu (18,7%), kriteria kemudahan (17%), dan kriteria biaya (16,8%). Berdasarkan kriteria yang ditentukan, transportasi umum online menjadi prioritas masyarakat dalam memilih moda transportasi umum dengan bobot sebesar 58,80% dan transportasi umum konvensional (41,20%). Dari penelitian ini juga mendapatkan hasil analisis sensitivitas terhadap pemilihan moda transportasi umum. Hasil analisis sensitivitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transportasi umum online masih menjadi prioritas dalam pemilihan moda transportasi umum di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Martapura. Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum Terhadap Frekuensi Perjalanan pada tahun 2024 sebanyak 75% dengan target yang ditetapkan yaitu 73% sehingga persentase capaian sebesar 102,74%.

- b. Persentase Ruas Jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan

Ruas jalan provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan berdampak pada pengurangan angka kecelakaan di ruas jalan tersebut. Terdapat 15 segmen jalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada 15 segmen tersebut sudah terpasang 3 segmen pada tahun 2024. Pada Indikator Kinerja yaitu Persentase Ruas Jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan jalan pada tahun 2024 sebanyak 32,85% dengan target yang ditetapkan yaitu 32,85% sehingga persentase capaian sebesar 100%.

c. Persentase Panjang Alur Pelayaran Sungai yang memenuhi standard

Terdapat 4 alur sungai di Kalimantan Selatan, ditahun 2024 peningkatan panjang alur sungai yang bisa dilayari dan dibersihkan dari sampah sebanyak 4 buah alur sungai yang secara keseluruhan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja pada tahun ini masih belum bisa memenuhi target jangka menengah, Pada Indikator Kinerja yaitu Persentase Panjang Alur Pelayaran Sungai yang memenuhi standard pada tahun 2024 sebanyak 65% dengan target yang ditetapkan yaitu 63% sehingga persentase capaian sebesar 103.17%.

d. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Terminal Tipe B

Persentase Indek Kepuasan Layanan Masyarakat di Terminal Tipe B, Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan sesuai dengan SOP Terminal Tipe B terealisasi sebesar 109.86% dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2021 terdpat perubahan indikator kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan karena terjadi perubahan Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai berikut

a. Rasio Konektivitas Provinsi

Masing masing realisasi indikator kinerja yaitu Rasio Rasio Konektivitas provinsi pada tahun 2021 sebesar 0.5987 dengan

target yang ditetapkan yaitu 0.5987 sehingga persentase capaian sebesar 100%.

- b. On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air)  
Pada Indikator Kinerja yaitu On Time Performance Layanan Transportasi (Darat dan Air) pada tahun 2021 sebanyak 0.166 dengan target yang ditetapkan yaitu 0.166 sehingga persentase capaian sebesar 100%.
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi  
Pada Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi pada tahun 2021 sebanyak 77,5 dengan target yang ditetapkan yaitu 81,15 sehingga persentase capaian sebesar 95,5%.
- d. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan  
Pada indikator Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan Pada Tahun 2021 Sebesar 0 Dengan Target Yang Ditetapkan yaitu 0 Sehingga persentase capaian sebesar 100%

#### **2.4.2 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi  
Tahun 2024 dinas perhubungan melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi mengalami kenaikan 3,65%, dengan capaian 88,12 % dengan target 81,25%. Kenaikan ini terjadi meningkatnya jumlah penumpang Bus BTS.
2. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian per 100.000 Keberangkatan

Capaian indikator kinerja tersebut tercapai 100%, hal ini dikarenakan dukungan program dan kegiatan yang memenuhi sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, pengawasan angkutan yang sesuai peruntukan dan izinnya Untuk Mewujudkan keselamatan pengguna transportasi salah satunya didukung oleh perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan terpelihara. Pemasangan perlengkapan keselamatan jalan di ruas jalan provinsi terdiri dari pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) *smart system*, trafict light pada persimpangan jalan yang rawan kecelakaan, pemasangan rambu jalan dan pengecatan rambu jalan. Selain di pasang, perlengkapan keselamatan jalan juga dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi dari perlengkapan keselamatan jalan tersebut

### **2.4.3 Kinerja Anggaran**

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada tabel di bawah disajikan kinerja anggaran mulai tahun 2021 sampai dengan 2024.

**Tabel 2.4.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kalsel**

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Tahun 2021-2025:</b>															
Belanja Tidak Langsung															
Belanja Langsung:															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.209	2.007	2.475	2.943	2.983	2.142,123	1.965,163	2.076,95	2.684,14	2.865,99	96.97%	97.91%	83.88%	91.20%	96.04%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	919	870	764	1.209	2.133	817,115	854,561	736,24	832.156	923.358	88.90%	98.16%	96.34%	68.82%	43.27%
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75	75	78	200	200	73,146	72,561	68,53	71.52	189,25	97.33%	96%	87.18%	35.50%	94.50%
Program Pembangunan	15.000	15.000	15.000	20.000	25.000	14.894,145	14.6524,986	14.621,16	18.965,14	8.100,132	99.29%	97.%	97.47%	94.83%	32.40%

Dan Rehabilitasi Sarana Dan Sarana Perhubungan															
Program Peningkatan Pelayanan Dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	4.684	4.760	5.402	8.750	10.000	4.576,18	4.696,35	5.367,12	7.986,54	3.525,463	97.69%	98.66%	99.35%	91.27%	35.25%
<b>Tahun 2021:2025</b>															
Belanja															
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					15.779,700					14.756.803					94,09%
Program Penyelenggaraan LLAJ					8.371,922					7.767.345					70,11%
Program Pelayanan					3.549,577					3.698.800					97,04%

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

## **2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran pelayanan urusan perhubungan meliputi seluruh masyarakat yang terkait dengan transportasi dan lalu lintas, baik pengguna jalan, pengusaha transportasi, maupun pihak-pihak yang terkait dengan perizinan, pengujian kendaraan, dan infrastruktur transportasi.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan urusan perhubungan secara lebih detail:

### a) Pengguna Jalan:

Warga yang menggunakan fasilitas transportasi seperti jalan, terminal, dan halte bus.

### b) Pengusaha Transportasi:

Pemilik atau pengelola usaha transportasi seperti angkutan umum (bus, taksi, dll), pengusaha perkeretaapian, dan pelayaran.

### c) Pemilik Kendaraan Bermotor:

Warga yang memiliki kendaraan bermotor yang perlu diurus izinnya, pengujiannya (Uji KIR), atau keperluan lain terkait kendaraan.

### d) Pihak-Pihak yang Terkait:

Pihak yang terlibat dalam perizinan transportasi (izin trayek, izin usaha transportasi), pengujian kendaraan, atau infrastruktur transportasi (pengadaan alat penerangan jalan, dll).

### e) Pemerintah:

Dinas Perhubungan juga melayani kebutuhan pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan transportasi, serta penanganan lalu lintas.

Dengan kata lain, Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk melayani semua pihak yang terkait dengan transportasi dan lalu lintas di wilayahnya.

## **2.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

PT Bagong, perusahaan otobus yang beroperasi di berbagai rute, memiliki hubungan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal regulasi dan operasional. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab untuk mengatur izin operasional, rute, standar

keamanan, dan aspek terkait lainnya yang berkaitan dengan transportasi umum seperti bus.

Elaborasi:

- **PT Bagong:**

Perusahaan otobus yang menyediakan layanan transportasi bus antar kota, antar negara, dan juga untuk keperluan pariwisata dan angkutan karyawan tambang.

- **Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:**

Merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan perhubungan di wilayahnya, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

- **Hubungan Antara PT Bagong dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan:**

- **Regulasi:** Dinas Perhubungan membuat dan menerapkan peraturan serta regulasi terkait transportasi umum, termasuk PT Bagong.
- **Izin Operasional:** PT Bagong membutuhkan izin operasional dari Dinas Perhubungan untuk dapat menjalankan bisnisnya.
- **Standar Keamanan:** Dinas Perhubungan memastikan bahwa PT Bagong mematuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam operasional bus.
- **Pengawasan Rute:** Dinas Perhubungan juga mengawasi rute-rute yang dilalui oleh bus-bus milik PT Bagong untuk memastikan kelancaran transportasi.
- **Kerja Sama:** PT Bagong dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam berbagai kegiatan, seperti pengembangan infrastruktur transportasi, promosi, atau kegiatan sosialisasi.

## 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 2.7.1.

**Tabel 2.7.1**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Perlunya pemantapan system transportasi dan konektivitas antar kawasan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	Tingginya kemacetan di jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sistem manajemen lalu lintas untuk mengurangi kepadatan lalu lintas</li> <li>2. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan serta integrasi antar moda angkutan</li> <li>3. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian</li> <li>4. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah</li> <li>5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi</li> <li>6. Belum optimalnya pelaksanaan andalalin</li> <li>7. Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas</li> </ol>

			8. Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
		Belum optimalnya perizinan dan pelayanan angkutan umum yang menghubungkan bandara, pelabuhan, terminal dan stasiun pada pusat kegiatan strategis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi dan Perbatasan (masih adanya perbatasan yang belum terlayani Angkutan Umum, rendahnya pengembangan Angkutan Massal, kurangnya jumlah Trayek Angkutan Umum perintis)</li> <li>2. Belum optimalnya pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Belum optimalnya integrasi Angkutan lanjutan dan Kawasan, Tingginya pelanggaran ijin Angkutan sewa dan sewa khusus, tidak terkendalinya pertumbuhan Angkutan sewa khusus)</li> </ol>
		Belum optimalnya pelayanan Terminal Tipe B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya pengemudi angkutan umum yang cenderung naik/menurunkan di luar terminal</li> <li>2. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah</li> <li>3. Rendahnya kondisi infrastruktur terminal tipe B di Kalimantan Selatan</li> <li>4. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis pengelolaan terminal</li> </ol>
		Belum optimalnya kinerja transportasi Perairan	1. Masih terbatasnya jumlah prasarana dan sarana penyeberangan ASDP

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) untuk mendukung transportasi pariwisata dan pengembangan wilayah</li> <li>3. Belum optimalnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan Perairan</li> <li>4. Belum optimalnya kelancaran alur pelayaran sungai danau dan penyeberangan</li> </ol>
		Belum Tersedianya Angkutan Perkeretaapian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya nilai investasi infrastruktur, sarana dan operasional angkutan kereta api sehingga menyebabkan pihak swasta dan pemerintah belum mampu untuk merealisasikan rencana pembangunan perkeretapian di Kalimantan.</li> </ol>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

### 2.7.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan

Berbagai kondisi Internal dan Eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat

mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan meliputi :

1. Strengths (kekuatan) Internal
  - a) Adanya payung hukum yang kuat dan SDM yang potensial pada penyelenggaraan Perhubungan serta koordinasi antar instansi, Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik
  - b) Beroperasinya layanan angkutan umum aglomerasi Dan Terdapat simpul transportasi dalam satu kawasan di wilayah Banjarbakula
2. Weaknesses (kelemahan) Internal
  - a) Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana keselamatan transportasi.
3. Oportunities (peluang) Eksternal
  - a) Adanya aglomerasi pengembangan kawasan strategis wilayah dan ditetapkannya KSP di Kalimantan Selatan
  - b) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
  - c) Adanya layanan transportasi masal perkotaan yang dapat digunakan sebagai feeder dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
4. Threats (tantangan) External
  - a) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor
  - b) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan didasarkan pada urutan prioritas, agar memudahkan proses perumusan strategi. Berikut ini merupakan bagan analisis SWOT.

**Tabel 2.7.1.1  
Analisa SWOT**

INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
EXTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya payung hukum yang kuat dan SDM yang potensial pada penyelenggaraan perhubungan serta koordinasi antar instansi, Pemerintah Pusat dan kabupaten / kota yang baik</li> <li>2. Beroperasinya layanan angkutan umum BRT Banjarkakula</li> </ol>	Terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana keselamatan transportasi
PELUANG	S-O	W-O
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau</li> <li>2. Adanya layanan transportasi masal perkotaan yang dapat digunakan sebagai feeder.</li> <li>3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis sustainable transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata</li> </ol>	
ANCAMAN	S-T	W-T

<p>1. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor</p> <p>2. Rendahnya ,disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi</p>	<p>Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal)</p>	<p>Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan.dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.</p>
---	--	--

*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024*

#### 5. Strategi Strengths - Oportunities

- a) Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ( menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien.
- b) Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis sustainable transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata

#### 6. Strategi Strengths – Threats

- a) Pengembangan sistem angkutan umum masal (SAUM) yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya mengurangi kemacetan;

## 7. Strategi Weaknesses – Threats

- a) Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

### 2.8 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kalimantan Selatan, maka Visi Tahun 2025-2029 yaitu:

**“ KALSEL BEKERJA “**  
***Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera***

Makna yang terkandung dalam visi Kalimantan Selatan 2025 - 2029 dijabarkan sebagai berikut :

Berkelanjutan	;	1. Melanjutkan Pembangunan Periode Sebelumnya 2. Pembangunan yang Seimbang antara sosial. Budaya ekonomi dan lingkungan
Berbudaya	;	Masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang memiliki pikiran dan akal yang maju
Religi	;	Masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika

Sejahtera	;	Kebutuhan Jasmani, Rohani, dan Rasa Aman yang terpenuhi bagi Masyarakat
-----------	---	---

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, yaitu

1. Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
2. Pembangunan Infrastruktur yang Handal
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
4. Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
5. Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

“KALSEL BERKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera)”. Makna mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, aman dan sentosa dengan upaya untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang merata dengan memperhatikan keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, memperkuat sarana prasarana dasar perekonomian untuk kemakmuran masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, penguatan terhadap ketahanan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebagaimana halnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, maka janji-janji yang telah disampaikan pada saat kampanye merupakan substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Janji-janji dimaksud dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya akan menjadi pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut, urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan secara langsung mendukung **Misi Ke Dua “Pembangunan Infrastruktur Yang Handal”**

Permasalahan yang terjadi beserta faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah terhadap pencapaian Misi Kepala Daerah, disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.8.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah**

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	MISI 2: Pembangunan Infrastruktur Yang Handal	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengembangan lalu lintas angkutan jalan, pemanduan moda transportasi, dan pengelolaan terminal	Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan	Penghambat: Belum Optimalnya kebijakan pemerintah dalam mendukung mobilisasi masyarakat pengguna sarana transportasi
				Pendorong: Dukungan kebijakan dan pendanaan Pemerintah Pusat serta <i>stake holder</i> untuk mengembangkan transportasi umum massal semakin meningkat
			Masih rendahnya ketersediaan dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Penghambat: Kurang optimalnya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transportasi massal yang tersedia
				Pendorong: Mengintegrasikan keterpaduan moda antar koridor pelayanan transportasi antara pemerintah pusat dan daerah
		Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah	Penghambat: 1. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas. 2. Masyarakat di Kalimantan selatan masih terbiasa menggunakan sarana transportasi pribadi	
			Pendorong: Pemerintah provinsi kalamantan selatan telah menyediakan sarana transportasi massal dan	

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				menyediakan trayek-trayek yang untuk mendukung kegiatan mobilitas masyarakat
			Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan	Penghambat: Tidak seimbang pertumbuhan dan perkembangan Jalan dengan Fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang  Pendorong: Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta untuk mendukung ketersediaan jumlah fasilitas perlengkapan jalan
			Masih tingginya overloading angkutan barang	Penghambat: Kurang patuhnya pengemudi angkutan barang untuk mengikuti peraturan terkait batas berat dan dimensi angkutan barang  Pendorong: Adanya peraturan Menteri Perhubungan No 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
		<b>Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pengendalian oprasional dan angkutan Pelayaran</b>	Belum tersedianya pelabuhan regional	Penghambat Kesulitan untuk menemukan lokasi ideal untuk pelabuhan skala internasional yang sanggup mengakomodasi kapal dengan draft di atas 15 m dan juga besarnya biaya untuk membangun pelabuhan pelabuhn baru  Pendorong: Adanya program strategis pemerintah di Provinsi Kalimantan selatan berupa pengembangan kawasan industry Batulicin dan kawasan industry jorong serta program strategis provinsi berupa kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, juga danya program pembangunan Ibukota negara IKN di Penajam Paser Utara yang letaknya relative dekat dengan kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tabalong.

Sumber: Hasil analisis 2025

## 2.9 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

**Tabel 2.9.1**  
**(b) Internalisasi dan Dukungan terhadap SDGs**

Kode Indikator	Indikator SDGs Metaadata III	Program / Sub Kegiatan Pendukung
<b>9</b>	<b>Industri, Inovasi dan Infrastruktur</b>	
9.1	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	
9.1.2. (b)	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran
9.1.2.(c)	Jumlah Pelabuhan Strategis	2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran
9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang berdasarkan Moda Transportasi	2.15.03 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
<b>17</b>	<b>Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</b>	
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	
17.17.1.(b)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama dan Badan Usaha (KPBU)	2.15.03 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

### **2.9.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan**

Dalam Renstra 2020-2024 sangat diharapkan Perhubungan dapat menghasilkan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan menjadi bahan masukan/rekomendasi penyusunan program/kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan kebijakan sektor transportasi secara luas.

Mengantisipasi perubahan kebijakan nasional transportasi dan program/proyek strategis dalam Renstra Kemenhub 2020-2024 serta melihat kemungkinan implementasi skala penuh atau skala parsial dari beberapa Rencana Induk, Tatanan Nasional, dan Cetak Biru, penelitian transportasi diarahkan kepada dukungan penuh substansi, argumentasi akademik, pedoman teknis (best practice), dan dukungan kerangka legal dan kelembagaan terhadap percepatan pembangunan dan reformasi kelembagaan ekonomi transportasi.

Faktor-faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam merancang penelitian transportasi mencakup antara lain kecenderungan perekonomian global, regional, dan nasional serta perekonomian lokal, perkembangan terbaru teknologi transportasi, kondisi demografi, kewilayahan dan kelautan, dan keperintisan. Faktor strategis lainnya termasuk bentuk kelembagaan ekonomi transportasi masa depan, kualitas sumberdaya manusia, dan kolaborasi penelitian lintas subsektor dan lintas sektor. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 2.9.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan**

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi</li> </ul>
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan Produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan transportasi  Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan  Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik"	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum  Meningkatnya pengawasan dan pengendalian  Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum  Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"  Indeks RB Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber: Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024

Terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan tersebut kemudian dilakukan penelaahan terkait permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 2.9.1.2**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Perhubungan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KL	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya konektivitas nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum berkembangnya sistem jaringan transportasi masal perkotaan berbasis jalan dan rel serta integrasi antar moda angkutan</li> <li>2. Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan alokasi anggaran</li> <li>2. Kurang optimal nya keterjangkauan wilayah yang dapat di akses oleh sarana transpoetasi masal yang tersedia</li> <li>3. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih rendah dan terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat sangat antusias dengan adanya angkutan masal BRT</li> <li>2. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan umum</li> </ol>
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat masih terbiasa menggunakan sarana tranSPORTasi pribadi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah menyediakan angkutan umum yang aman dan nyaman serta terintegrasi.</li> </ol>
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan</li> <li>2. Masih tingginya overloading angkutan barang;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi dana masih terbatas</li> <li>2. Masih tingginya tingkat fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalulintas</li> <li>2. Penegakan Hukum untuk menuju Zoro Odol Tahun 2023</li> </ol>

Sumber: Hasil analisis, 2021.

## 2.9.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

**Tabel 2.9.2.1**  
**Telaahan Renstra Kabupaten/Kota**

Dinas Perhubungan kota Banjarmasin				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pelayanan infrastruktur Inklusif bidang perhubungan	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas</li> <li>• Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas</li> <li>• Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan</li> </ul>
		Meningkatnya Konektifitas Kota	Meningkatkan Penggunaan Angkutan Umum Massal Trans Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum</li> <li>• Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Umum Trans Banjarmasin</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan</li> </ul>
		Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter angkutan umum	Meningkatkan Penggunaan Angkutan Sungai yang Terintegrasi dengan Angkutan Darat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai</li> <li>• Penyediaan Angkutan Sungai</li> <li>• Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin</li> <li>• Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai</li> </ul>

		Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan	Mengoptimalkan dan Mengembangkan Dermaga/Pelabuhan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi StandarKeamanan dan Keselamatan</li> <li>• Peningkatan PelayananDermaga/Pelabuhan Sungai</li> <li>• Melakukan Pemeliharaan Rutin Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya</li> </ul>
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan</li> </ul>
Dinas Perhubungan kota Banjarbaru				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan pengawasan penatausahaan keuangan;	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan;
2.	Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;	Meningkatkan kualitas tatalaksana dan kinerja pelayanan
3.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar	Pengembangan angkutan pelajar gratis	Menyediakan sarana angkutan pelajar

4.	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas	Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	Pengembangan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal;	Membangun simpul-simpul transportasi yang terpadu dengan layanan antar dan inter mode yang berbasis Transit Oriented Development;
			Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana angkutan jalan;	Menyediakan dan pemeliharaan prasarana angkutan jalan secara bertahap dan terencana;
			Peningkatan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala;	Menyediakan sarana dan prasarana Unit Pengujian yang dilakukan secara bertahap;
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;	Menyediakan dan pemeliharaan sarana, prasarana pendukung keselamatan lalu lintas;
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait untuk kelancaran lalu lintas angkutan jalan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan oleh pengguna jalan;
			Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang terdapat pada pelaksanaan urusan bidang perhubungan;	Melaksanakan pembinaan, penertiban, pengawasan dan penindakan terhadap penyelenggara perparkiran

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kelaikan sarana transportasi yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kelaikan sarana transportasi yang berwawasan lingkungan	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor yang berkualitas, efektif, dan efisien
2.	Idealisasi simpulsimpul transportasi darat	Idealisasi simpulsimpul transportasi darat	Menciptakan sistem hirarki simpul-simpul pelayanan angkutan umum berupa terminal, dermaga, halte	Menyediakan prasarana/simpulsimpul transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan
<b>Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala</b>				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya Jasa Pelayanan Transportasi Yang Prima	Meningkatnya Jumlah arus penumpang angkutan umum	Meningkatkan Jumlah arus penumpang angkutan umum	Peningkatan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas
		Meningkatnya Jumlah uji kir angkutan umum	Meningkatkan Jumlah uji kir angkutan umum	Peningkatan kualitas pelayanan KIR
		Meningkatnya Jumlah Pelabuhan Udara	Meningkatkan Jumlah Pelabuhan Udara	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
		Meningkatnya Persentase layanan angkutan darat	Meningkatkan Persentase layanan angkutan darat	Peningkatan kualitas pelayanan angkutan
		Meningkatnya Pemasangan Rambu - rambu	Meningkatkan Pemasangan Rambu - rambu	Penyediaan dan pemeliharaan prasarana perhubungan

		Meningkatnya Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Meningkatkan Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Peningkatan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas
<b>Kabupaten Hulu Sungai Selatan</b>				
<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan	Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan
				Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan
<b>Dinas Hulu Sungai Tengah</b>				
<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya profesionalisme aparatur dan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Data	Memperkuat kebijakan pemda berbasis data (policy by evidence) dan regulatory impact assesment
				Memperkuat implementasi SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH
<b>Dinas Hulu Sungai Utara</b>				
<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>

1.	Meningkatnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatkan akses pelayanan transportasi darat dan sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan dan Pemeliharaan marka jalan</li> <li>2. Pemeliharaan alur sungai dan rambu sungai</li> </ol>
Dinas Perhubungan kota Balangan				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara optimal dan meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas kesematan jalan serta melaksanakan pemeliharaan fasilitas kesematan jalan</li> <li>2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana terminal dan perparkiran</li> <li>3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</li> <li>4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan</li> <li>5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor</li> <li>6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar</li> <li>7. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat</li> </ol>

			Menyelenggarakan layanan transportasi melalui penyediaan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses layanan transportasi darat</li> <li>2. Meningkatkan sistem dan simpul jaringan transportasi</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan terminal dan perparkiran</li> <li>5. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan</li> </ol>
Dinas Perhubungan kota Tabalong				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Memberikan reward dan punishmen.	Meningkatkan monitoring dan pengawasan secara bertahap dan berjenjang disertai penanaman nilai integritas serta tanggungjawab pencapaian kinerja.

		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perhubungan yang mumpuni dan handal, meliputi kemampuan aparatur dibidang teknis perhubungan, administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan.	Melaksanakan peningkatan dan pengembangan profesionalisme SDM aparatur.	Meningkatkan SDM dibidang teknis perhubungan, administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
		Meningkatnya mutu pelayanan dan pembuatan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	Melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berjenjang dan terus menerus.	Meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan, pembuatan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya layanan jasa perparkiran, kelengkapan fasilitas keselamatan jalan / sungai /danau, fungsi halte, terminal, stasiun, jembatan penyebrangan orang dan pelabuhan sungai / danau;	Peningkatan manajemen dan penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan/sungai, danau;	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan/sungai/ danau.
			Tersedianya terminal angkutan penumpang dan rest area pada setiap Kabupaten/ Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;	Revitalisasi, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan terminal angkutan darat
			Tersedianya jasa parkir yang didukung dengan tempat/gedung parkir yang memadai dan representatif di Kabupaten/Kota.	Revitalisasi, pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan jasa perparkiran
			Tersedianya pelabuhan untuk melayani kapal sungai dan danau;	1 Mendorong dan memfasilitasi pembangunan pelabuhan untuk melayani kapal sungai dan danau

			Tersedianya jembatan penyebrangan orang (JPO);	Pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO) pada area yang tingkat kepadatan lalulintasnya tinggi.
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kendaraan bermotor yang laik jalan;	Peningkatkan kinerja, kualitas dan kuantitas serta akreditasi pengujian kendaraan bermotor;	Meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji kendaraannya secara teratur dan berkelanjutan
				Meningkatkan pelayanan, sarana, prasarana dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standart kementerian perhubungan.
		Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan / sungai / danau;	Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas jalan / sungai / danau;	Meningkatkan pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas.
		Meningkatnya keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan, sungai / danau;	Peningkatan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalan/sungai/danau;	Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan tentang keamanan dan keselamatan lalu lintas.
				Memperkuat intensitas, kajian, pengawasan dan pengendalian keselamatan lalu lintas jalan/sungai/danau.

		Meningkatnya aksesibilitas dan pergerakan distribusi orang dan barang/jasa;	Peningkatan kelancaran system pelayanan dan peran angkutan transportasi perkotaan dan pedesaan;	Revitalisasi dan pengembangan angkutan perkotaan dan pedesaan.
				Membangun system transportasi perkotaan dan pedesaan yang terintegrasi dengan RTRW dan ramah lingkungan.
				Penyusunan Norma, Standar, pedoman dan kriteria pelayanan angkutan
			Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek;	Pembangunan dan pemeliharaan halte pada jalur trayek angkutan kota/desa.
		Mendorong percepatan pembangunan rel kereta api Kaltim – Kalsel serta peningkatan fungsi Bandar udara dan pengembangannya;	Mendorong pembangunan rel kereta api Kaltim – Kalsel serta peningkatan fungsi Bandar udara dan pengembangannya;	Mendorong kemajuan operasional bandara dan peningkatan status bandara khusus menjadi bandara umum.
				Mendukung dan memfasilitasi pembangunan rel kereta api Kaltim – Kalsel yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
Dinas Perhubungan Tanah Bumbu				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

1.	Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi	Meningkatnya konektivitas moda transportasi kabupaten	1. Membangun sarana dan prasarana transportasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	1. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang meningkatkan perekonomian masyarakat daerah.
			2. Meningkatkan transportasi antar moda	2. Meningkatkan pelayanan transportasi antarmoda yang handal dan berdaya saing dengan prioritas angkutan publik layanan utama
			3. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan.	3. Mengupayakan pemasangan fasilitas keselamatan jalan khususnya disepanjang jalan kabupaten
			4. Pengawasan secara berkala terhadap angkutan dan pengguna jalan lain terhadap kelengkapan dokumen angkutan dan kelayakan teknis angkutan.	4. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap perijinan angkutan.
			5. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai dan danau	5. Mengupayakan terjadinya pembangunan sarana dan prasarana transportasi angkutan sungai dan danau
Dinas Perhubungan Tanah Laut				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Meningkatkan prasarana lalu lintas	Peningkatan prasarana lalu lintas
2.	Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas	Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Melaksanakan pengamanan jalan dan pengujian kendaraan bermotor	Penyusunan aturan hukum mengenai kendaraan yang layak jalan
Dinas Perhubungan Tapin				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
				Meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
				Meningkatkan efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah

			Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
			Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perangkat daerah
2.	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar	Meningkatnya kapasitas prasarana perhubungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana fasilitas perhubungan	Menyediakan prasarana fasilitas transportasi sesuai dengan kebutuhan
		Meningkatnya dan optimalisasi kinerja pelayanan jasa perhubungan	Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan pembaharuan regulasi lalu-lintas dan angkutan	Penataan jaringan trayek, pengawasan dan sosialisasi bidang lalu-lintas dan angkutan
3.	Meningkatnya investasi daerah	Menurunnya jumlah kecelakaan lalu-lintas darat	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan transportasi	Menyediakan fasilitas penunjang keselamatan dan keamanan transportasi
		Meningkatnya kelayakan pengoperasian sarana transportasi	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	Menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standarisasi nasional

Sumber: Hasil analisis 2024.

Hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pehubungan kabupaten/kota, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

## **2.10 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

### **2.10.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari : (a) jaringan jalan; (b) jaringan prasarana lalu lintas; (b) jaringan pelayanan lalu lintas; dan (d) jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;serta (e) jaringan kereta api. Untuk mendukung perkembangan wilayah Kalimantan Selatan perlu usaha peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung potensi wilayah di Kalimantan Selatan ang merupakan salah satu simpul strategis. Rencana jaringan jalan di Kalimantan Selatan meliputi penentuan fungsi jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan.

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah yaitu dengan menghubungkan semua simpul atau pusat-pusat pelayanan secara langsung/menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal hingga pusat kegiatan lingkungan.

Rencana Sistem Jaringan Kereta Api Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas : Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.

- b. Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut.
- c. Rencana pengembangan kereta api Banjarmasin-BandaraSyamsudin Noor- Martapura

**Tabel 2.10.1.1**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Kebijakan RTRW	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Rencana Pengembangan system Prasarana Transportasi Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>BRT Banjarbakula</li> </ul>	<p><b>Tugas Pokok:</b> membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p> <p><b>Fungsi :</b></p>	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di kawasan Banjarbakula	<p><b>Penghambat:</b> Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan(angkutan feeder)guna mendukung operasional BRT dikawasan Banjarbakula</p> <p><b>Pendorong:</b> Terdapat jaringan trayek yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi</p>
2.	Rencana Pengembangan system Prasarana Transportasi Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Type B</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;</li> <li>Pelaksanaan kebijakan Bidang</li> </ol>	Belum Optimalnya terminal penumpang Tipe B di Kabupaten Tabalong	<p><b>Penghambat:</b> Terminal tipe B yang ada saat ini yang merupakan pelimpahan p3d daerah yang kondisinya tidak sesuai dengan standar terminal tipe B</p> <p><b>Pendorong:</b> Terus dikembangkan peningkatan simpul</p>

		Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;		transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3.	Rencana pengembangan system Prasarana Tranportasi SDP <ul style="list-style-type: none"> <li>Transportasi Sungai Danau</li> </ul>	3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran; 4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan	Belum optimalnya pengembangan dan/atau pengelolaan Pelabuhan sungai dan danau	<b>Penghambat:</b> Pergeseran penurunan penggunaan moda angkutan sungai. <b>Pendorong:</b> Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.
4.	Rencana pembangunan jalan kereta api	5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Selatan	<b>Penghambat:</b> Tingginya nilai investasi yang mengakibatkan kebijakan pemerintah pusat dan swasta belum mampu untuk merealisasikan rencana pembangunan perkeretapian di Kalimantan. <b>Pendorong:</b> Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang IKN baru

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2024

### 2.10.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau

program. Kajian ini memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang telah disusun bersamaan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, maka dirumuskan isu strategis KLHS dan beberapa rekomendasi berupa antisipasi/mitigasi/adaptasi yang terkait urusan Perhubungan seperti pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.10.2.1**  
**Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Pada Pilar Ekonomi dan Lingkungan Terkait Urusan Perhubungan**

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis berdasarkan analisis capaian TPB	Kode Indikator	Kategori Capaian	Isu Strategis terkait DDDT Lingkungan Hidup dan Keuangan Daerah	Wilayah Prioritas
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	a. Belum Tercapainya pengembangan Transportasi, yang berkualitas, handal, tangguh dan berkelanjutan	11.2.1(a)	B		
	b. Transportasi Umum yang belum berjalan dengan baik di perkotaan	11.2.1(a) 11.2.1(b)	B		Kota Banjarmasin, Banjarbaru
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Belum Mantapnya fasilitas Penyebrangan	9.1.2 (b)	B		

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

**Tabel 2.10.2.2**  
**Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029**

No.	Isu Strategis Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan	Isu TPB	Lokasi	Rekomendasi Program Sesuai Kepmen 050	SKPD
1	TPB Pilar Lingkungan Tujuan 11 Menjadikan Kota dan pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Belum Tercapainya pengembangan Transportasi, yang berkualitas, handal, tangguh dan berkelanjutan	13 Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan ANgkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Jumlah angkutan umum yang terbatas serta Rendahnya kemampuan integrasi antarmoda dan menghambat konektivitas dan mobilitas antarpusat kegiatan	Transportasi Umum yang belum berjalan dengan baik di perkotaan	13 Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan ANgkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
2	TPB Pilar Ekonomi Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Belum tersedianya pelabuhan laut internasional belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau. Kurang Optimalnya ketersediaan prasarana transportasi laut & ASDP	Belum Mantapnya fasilitas Penyebrangan		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

## 2.11 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
2. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis
3. Sistem dan jaringan transportasi intermoda/multimoda belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan tidak efesiennya dan efektifnya mobilitas penduduk;
4. Sarana dan prasarana transportasi yang belum sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan transportasi;
5. Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe B dan terminal angkutan barang
6. Belum optimalnya pelayanan dermaga penyeberangan
7. Belum tersedianya pelabuhan pengumpan regional dan dalam mendukung distribusi angkutan orang dan barang di Kalimantan Selatan
8. Belum adanya transportasi berbasis rel,
9. Kurangnya SDM berlatar belakang teknis perhubungan;

**Tabel 2.11.1**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Rencana aksi Keselamatan Jalan Provinsi Kalimantan Selatan	Masih rendahnya tingkat keselamatan dalam berlalu lintas	belum optimalnya penurunan tingkat kecelakaan berlalu lintas	Proyeksi peningkatan Populasi manusia dunia terus meningkat	meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mobiltas transportasi umum yang juga meningkatkan risiko kecelakaan transportasi di berbagai moda sehingga diperlukan kebijakan, teknologi, perilaku pengguna infrastruktur serta peran masyarakat dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkeselamatan.	Peningkatan penyediaan angkutan umum antar provinsi yang aman dan nyaman.	Masih rendahnya ketersediaan angkutan umum yang menghubungkan antar kawasan

<p>Peraturan Gubernur Nomor 018 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal Aglomerasi Perkotaan Banjarbakula</p>	<p>1. kurangnya akses angkutan umum (massal) ke seluruh wilayah 2. kurangnya kesadaran masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum 3. Kurangnya ketepatan waktu dalam pelayanan angkutan Massal Perkotaan</p>	<p>menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan infrastruktur sektor transportasi diantaranya terkait keterbatasan anggaran, komitmen stakeholders dan akses untuk menjangkau transportasi umum</p>	<p>Perubahan iklim (emisi Gas buang), Peningkatan emisi dari pembakaran biomassa kendaraan mengakibatkan polsi udara</p>	<p>penyediaan angkutan umum perkotaan yang ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi polusi udara di seluruh kota di Indonesia.</p>	<p>Peningkatan integrasi antar moda yang melayani antar provinsi sebagai bentuk implementasi penyediaan angkutan umum yang berkelanjutan, dengan 3 kebijakan antara lain kebijakan pelayanan, kebijakan pembiayaan dan kebijakan kolaborasi.</p>
<p>Banyaknya sungai yang dapat menjadi alternatif dalam melaksanakan transportasi air (penumpang dan barang), sehingga dapat mengurangi kapasitas perpindahan orang atau barang yang memalui jalan darat.</p>	<p>Tertutupnya alur pelayaran sungai yang mengakibatkan terganggunya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal sungai. (PELAYARAN)</p>	<p>peningkatan keamanan dan keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)</p>	<p>Peningkatan Jumlah sampai Global, setidaknya 33% sampai tidak dikelola dengan baik dan berdampak pada pencemaran laut, sungai dan lingkungan lainnya.</p>	<p>meningkatkan daya saing transportasi maritim Indonesia dan memeperkuat hubungan antarnegara di wilayah asia tenggara</p>	<p>membuka akses dan peningkatatan transportasi sungai / pelayaran antar provinsi</p>

<p>Peraturan Gubernur Nomor 034 Tahun 2024 Tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Tipe B Dan Trans Perkotaan Pada Dinas Perhubungan</p>	<p>1. Kurangnya optimalnya pelayanan terminal karena fasilitas sarana dan prasarana pada terminal tipe B yg ada di provinsi kalimantan selatan yang kurang berfungsi sesuai peruntukannya.</p>	<p>peningkatan kinerja terminal yang lebih memperhatikan pelayanan kepada pengguna terminal</p>	<p>Perubahan iklim (emisi Gas buang), Peningkatan emisi dari pembakaran biomassa kendaraan mengakibatkan polsi udara</p>	<p>revitalisasi terminal dan sinergi konektivitas terminal tipae A dengan terminal yang ada dalam kewenangan pemerintah daerah.</p>	<p>meningkatkan kolaborasi terminal regional / antar provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan angkutan umum</p>	
--	--	---	--	---	---	--

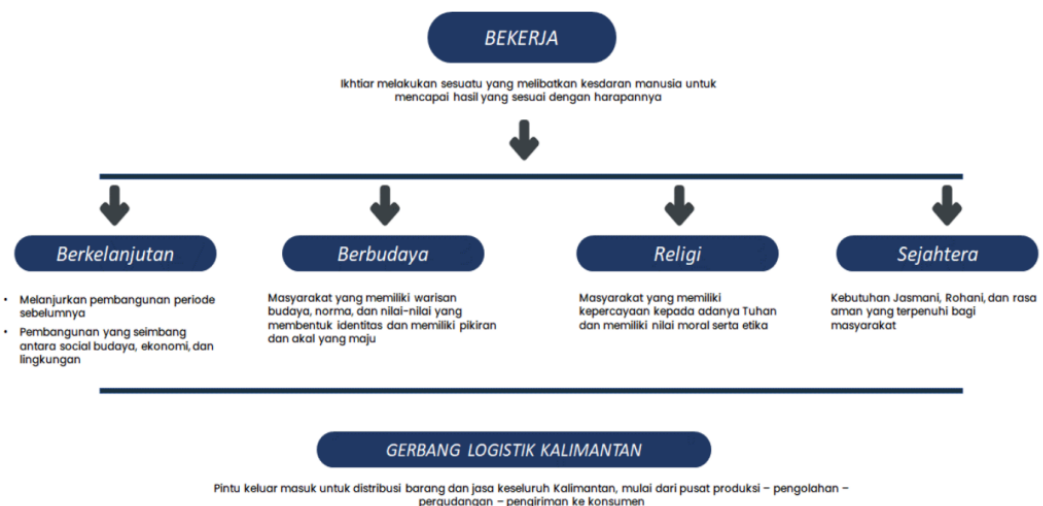
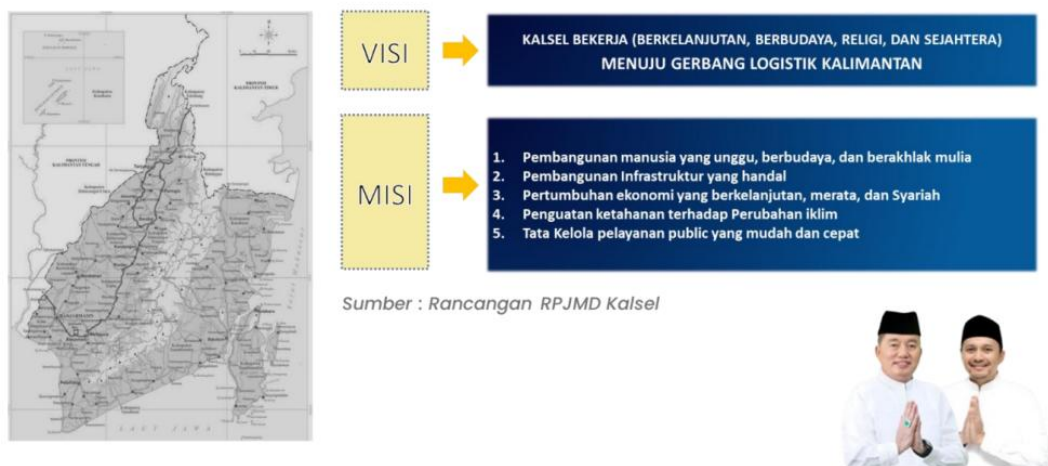
## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

#### 3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Setelah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2025 - 2029 terpilih maka perlu menetapkan visi misi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

**Gambar 3.1.1.1**



Sumber : Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kalsel 2026-2030

Tujuan pada RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang selaras dengan Bidang Perhubungan yaitu pada misi 2 pembangunan infrastruktur yang handal. Adapun Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 1 (Satu ) Tujuan, yaitu: “Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan”

### **3.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Bidang Perhubungan dan menjadi tugas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu meningkatkan konektivitas yang menghubungkan antar kawasan

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 4 (Empat) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Konektivitas Provinsi dengan indikator rasio konektivitas pada tahun 2026 sebesar 0.67
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator On time performance layanan transportasi sebesar 61.5
3. Meningkatkan Keselamatan Transportasi dengan rasio kejadian kecelakaan pada tahun 2026 sebesar 0 (zero)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi pada tahun 2026 sebesar 82.2

### **3.1.3 Strategi**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah dengan:

1. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi intermoda dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah secara menyebar dan merata
2. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas (menyebar dan merata) sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara menyebar dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

#### **3.1.4 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi Konektivitas, Keselamatan dan Kenyamanan.

1. Aspek Konektivitas

Meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan integrasi moda transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

2. Aspek Keselamatan

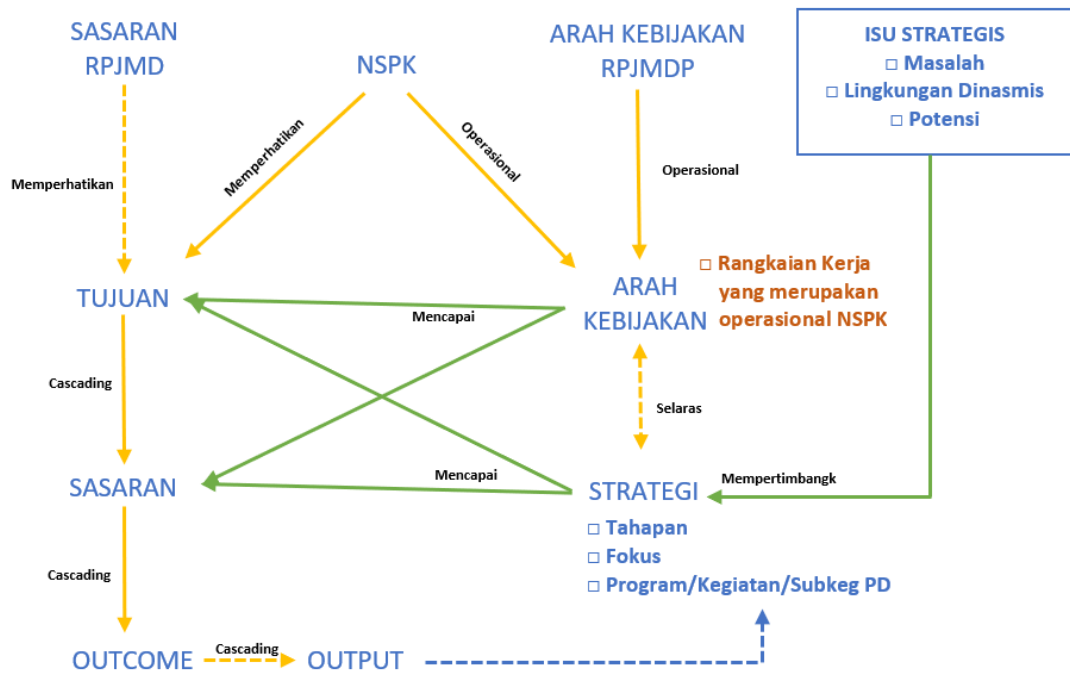
Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas.

3. Aspek Kenyamanan

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi yang ramah pengguna, inklusif, dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

Transportasi. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut

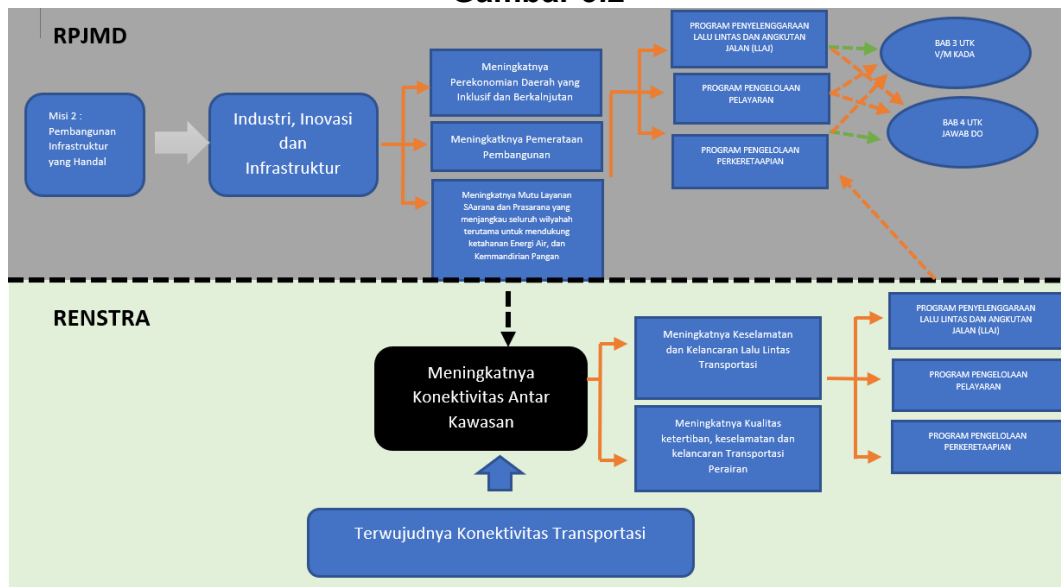
**Gambar 3.1**



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

### 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

**Gambar 3.2**



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

### 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3

#### Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>												
- Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan		Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1		
		Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	V/C Ratio di Jalan Provinsi (Nilai)	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)	89	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	82,76	86,73	90,2	90,03	90,4	90,5	90,6		
			Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)	2	2	2	2	2	2	2		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka)	88,32	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5		
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	0	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,51		
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)	0	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

### 3.4 Penahapan Proyek Strategis Renstra 2026-2030

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Proyek Strategis Renstra 2026-2030**

NO	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<b>BIDANG ANGKUTAN</b>					
1	Penyediaan layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS)	Penyediaan layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS)	Penyediaan layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS)	Penyediaan layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS)	Penyediaan layanan angkutan umum untuk jasa angkutan orang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi / perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS)
<b>BIDANG PELAYARAN</b>					
1	Pembersihan alur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah laut	Pembersihan alur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tanah laut	Pembersihan alur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tanah laut	Pembersihan alur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tanah laut	Pembersihan alur di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tanah laut
2	Kajian Studi Rencana Induk Perhubungan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Kalimantan Selatan				
3	Penyediaan Dermaga Kubus Apung di Riam Kanan Kabupaten Banjar	Penyediaan Dermaga Kubus Apung di Kabupaten Barito Kuala	Penyediaan Dermaga Kubus Apung di Kota Banjarmasin	Penyediaan Dermaga Kubus Apung di Sungai Martapura Kabupaten Banjar	Penyediaan Dermaga Kubus Apung di Kabupaten Tapin

4	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
<b>BIDANG LALU LINTAS JALAN</b>					
1	Pengadaan & Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Pengadaan & Pemasangan Zona Selamat Sekolah ZOSS	Pengadaan & Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS)	Pembangunan Halte Pintar (Smart Halte)	Pengembangan Smart System Perhubungan (Penerapan Teknologi Canggih untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Layanan di Sektor Transportasi)

<b>UPTD TERMINAL TIPE B DAN TRANS PERKOTAAN</b>					
1	Pemeliharaan Lanjutan Bangunan Gedung Kantor Banjarmasin	Lanjutan Pengadaan Paving Blok Halaman Belakang Terminal KM 6 Banjarmasin	Pemeliharaan Lanjutan Bangunan Gedung Kantor 5 Terminal Tipe B	Pemeliharaan Lanjutan Bangunan Gedung Kantor 5 Terminal Tipe B	Pemeliharaan Lanjutan Bangunan Gedung Kantor 5 Terminal Tipe B
2	Rehabilitasi Bangunan Ruang Tunggu Terbuka Terminal Banjarmasin	Rehab Gerbang dan Rehab Pagar Terminal KM.6	Jasa Pengawasan konstruksi	Jasa Pengawasan konstruksi	Jasa Pengawasan konstruksi
3	Jasa Pengawasan konstruksi	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Terminal Tipe B (5 Terminal)	Pemeliharaan Kios/Warung Terminal Kersik Putih	Pemeliharaan Halaman Parkir dan Halaman Kantor Terminal Mabu'un	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Warning Light, Rambu-rambu, Water Barrier dan PJU)
4	Review Desain Pembangunan Terminal Banjarmasin	Pemeliharaan Bangunan Pertokoan Terminal KM.6 (Plafond dan instalasi Listrik)	Pemeliharaan Saluran Air dan Trotoar Terminal Kersik Putih	Rehabilitasi Pos Retribusi Terminal Mabu'un	Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Tipe B (DED Kontruksi)
5		Jasa Pengawasan konstruksi	Rehabilitasi Shelter Terminal Stagen	Paving Blok Halaman Terminal Banua Lima	
6		Kajian Rencana Induk Pembangunan Terminal Tipe B	Pengecatan Bangunan Gedung Kantor dan Terminal Tipe B (5 Terminal)	Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Tunggu Terminal Banua Lima	
7		Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Tipe B (DED Kontruksi)	Pembangunan Halaman Parkir Terminal Banjarmasin	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Warning Light, Rambu-rambu, Water Barrier dan PJU)	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Warning Light, Rambu-rambu, Water Barrier dan PJU)
8		Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Warning Light, Rambu-rambu, Water Barrier dan PJU)	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (Warning Light, Rambu-rambu, Water Barrier dan PJU)	Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Tipe B (DED Kontruksi)	Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Tipe B (DED Kontruksi)

9		Pemeliharaan Jalan dan Halaman Terminal Banjarmasin (Pengaspalan)	Jasa Konsultansi Perencanaan Terminal Tipe B (DED Kontruksi)	Rehabilitasi Pos Retribusi Terminal Banjarmasin	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas-fasilitas Utama dan Penunjang hasil dari Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun sebelumnya
10		Pemeliharaan Jaringan Listrik Terminal (5 Terminal)	Rehabilitasi Ruang CCTV Terminal Tipe B	Rehabilitasi Kios/Warung Halaman Belakang Terminal	
11			Pemeliharaan Ruang Laktasi Terminal Tipe B	Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas-fasilitas Utama dan Penunjang hasil dari Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun sebelumnya	
12			Rehabilitasi Pos Pelayanan Terminal Tipe B		
13			Pemeliharaan/Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas-fasilitas Utama dan Penunjang hasil dari Jasa Konsultansi Perencanaan Tahun sebelumnya		

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

### 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

No	Opersionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Darat dan Air	Meningkatkan koordinasi pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan Banjarmasin serta kota-kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya	1. Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan BRT di kawasan Perkotaan  2. Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.  4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait guna mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian di Kalimantan Selatan.	

		Meningkatkan koordinasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sisi Timur wilayah Kalimantan Selatan secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	1. Mendorong Koordinasi Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia II wilayah Kalimantan Selatan dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	
		Mengembangkan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	1. Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan untuk distribusi logistik	
		Meningkatkan koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu (pelabuhan simpul domestik)	1. Mendorong Koordinasi pengembangan pelabuhan-pelabuhan di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi	

		Meningkatkan koordinasi pengembangan bandara utama (Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru) dan bandara lainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah	1. Mendorong Koordinasi data penumpang dan pengembangan fasilitas Bandara Syamsudin Noor dan bandara lainnya	
		Mewujudkan sistem transportasi yang aman dan andal bagi pengguna serta meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas	1. Meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas melalui optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	
		mengembangkan infrastruktur berkualitas untuk daerah potensi investasi	1. Mendorong peningkatan layanan angkutan barang untuk kelancaran distribusi barang	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

## **BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

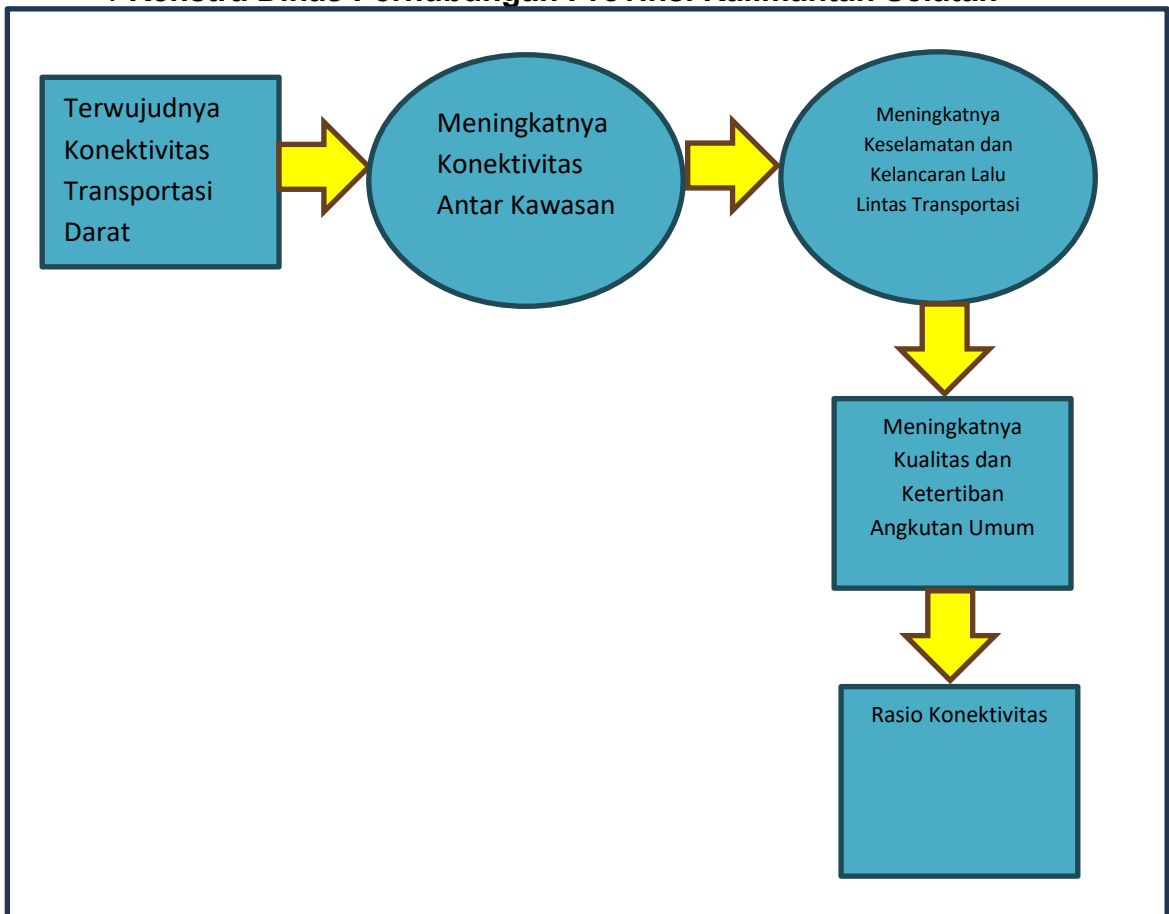
Indikasi rencana program prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif Rencana program Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 4 (Empat) program sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
2. Program pengelolaan pelayaran
3. Program pengelolaan perkeretaapian
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Rencana Pendanaan untuk program tersebut dari APBD untuk meningkatkan kinerja dan kebutuhan anggaran untuk pencapaian outcome dari program tersebut selama 5 tahun yaitu sebagai berikut:

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**



*Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025*

**Tabel 4.1**  
**Program Perangkat Daerah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR / OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					107.437.953.852,00		107.806.080.472,00		109.923.178.230,00		111.112.184.300,00		112.413.726.636,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.831.095.758,00		31.949.083.357,00		32.567.403.667,00		32.919.675.510,00		33.305.288.948,00	
Meningkatnya Kelancaran kegiatan	Persentase kegiatan	0	100	100	31.831.095.758,00	100	31.949.083.357,00	100	32.567.403.667,00	100	32.919.675.510,00	100	33.305.288.948,00	Dinas/Badan yang

n Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT	tepat waktu (%)													menangani Bidang Perhubungan
	Persentase laporan/ telaahan staf tepat waktu (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Aduan/Keluhan Antar	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani

	Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut (%)													Bidang Perhubungan
	Persepsi Internal Antar Bidang/ Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	80	80	80		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai pendapa	1000 0000 0	1000 0000 0	1200 0000 0		1300 0000 0		1400 0000 0		1500 0000 0		1600 0000 0		Dinas/Badan yang

	tan UPT (Rp)													menan gani Bidang Perhub ungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTA N JALAN (LLAJ)					71.593.96 0.394,00		71.859.33 6.099,00		73.250.05 1.647,00		74.042.37 5.500,00		74.909.69 0.700,00	
Meningkat nya kualitas layanan transporta si darat	Rasio Konektiv itas Darat (%)	0.63: 0.63	0.63: 0.63	0.63: 0.63	71.593.96 0.394,00	0.65: 0.65	71.859.33 6.099,00	0.65: 0.65	73.250.05 1.647,00	0.67: 0.67	74.042.37 5.500,00	0.67: 0.67	74.909.69 0.700,00	Dinas/B adan yang menan gani Bidang Perhub ungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOL AAN PELAYARA N					3.982.897 .700,00		3.997.661 .016,00		4.075.028 .964,00		4.119.107 .331,00		4.167.357 .598,00	

Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air (%)	0.62:0.62	0.62:0.62	0.62:0.62	3.982.897.700,00	0.62:0.62	3.997.661.016,00	0.63:0.63	4.075.028.964,00	0.63:0.63	4.119.107.331,00	0.64:0.64	4.167.357.598,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA AAPIAN					30.000.000,00		-		30.693.952,00		31.025.959,00		31.389.390,00	
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	-	100	30.693.952,00	100	31.025.959,00	100	31.389.390,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

TOTAL KESELURUHAN					107.437.953.852,00		107.806.080.472,00		109.923.178.230,00		111.112.184.300,00		112.413.726.636,00	
-------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>							
- Meningkatkan Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan				Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)		
		Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau			V/C Ratio di Jalan Provinsi (Nilai)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)			
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		

			Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
				Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
				Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	
			Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	

				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
				Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	

				Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.1.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.1.03.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	
				Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	

			Lintas yang berkeselamatan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	

				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	

			Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi	

					Kendaraan Bermotor Provinsi	
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
				Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.1.07.0010 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
				Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	2.15.02.1.07.0013 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

			Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
				Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
			Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang	

					Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	

				Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	
			Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12.0003 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	

				Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12.0004 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
			Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)		2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
		Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)		2.15.02.1.13.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		

				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	
			Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.14.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	

			<p>Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan</p>	<p>Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)</p>	<p>2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	
				<p>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)</p>	<p>2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	
				<p>Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)</p>	<p>2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>	

				Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.15.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan		Rasio Konektivitas Air (Rasio)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi,	

			Selatan diterbitkan		Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
				Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	2.15.03.1.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.03.1.05 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

			Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
			Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	

			atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.1.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	2.15.05.1.03 - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	2.15.05.1.03.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka)		
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)		
	Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT		Persentase kegiatan tepat waktu (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

				Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Nilai pendapatan UPT (Rp)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	

				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

			Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		2.15.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2.15.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
		Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	2.15.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	

				Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.3 a**  
**Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan provinsi Kalimantan Selatan**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				107.437.953.852		107.806.080.472		109.923.178.230		111.112.184.300		112.413.726.636		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				31.831.095.758		31.949.083.357		32.567.403.667		32.919.675.510		33.305.288.948		
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	31.831.095.758	100	31.949.083.357	100	32.567.403.667	100	32.919.675.510	100	33.305.288.948	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100		100		100		100		100			
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100		100		100		100		100			
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100		100		100		100		100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	80	80		84		86		88		90			
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	100.000.000	120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000			
2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				891.512.800		891.512.800		891.512.800		891.512.800		962.400.000		

Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	891.512.800	1	891.512.800	1	891.512.800	1	891.512.800	1	962.400.000	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	12		12		12		12		12		
2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			279.112.800		279.112.800		279.112.800		279.112.800		279.112.800	350.000.000	

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	279.112.800	4	279.112.800	4	279.112.800	4	279.112.800	4	350.000.000	
2.15.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.15.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.15.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.15.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	4	60.000.000	
2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.400.000		252.400.000		252.400.000		252.400.000		252.400.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	4	252.400.000	
2.15.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
2.15.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15.508.650.000		15.626.637.599		16.244.957.909		16.597.229.752		16.571.775.990	
Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	5	15.508.650.000	5	15.626.637.599	5	16.244.957.909	5	16.597.229.752	5	16.571.775.990	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	83	91		91		91		91		91		
2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.000.000.000		15.117.987.599		15.736.307.909		16.088.579.752		16.141.775.990	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	83	91	15.000.000.000	91	15.117.987.599	91	15.736.307.909	91	16.088.579.752	91	16.141.775.990	
2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		300.000.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	450.000.000	12	300.000.000	
2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	
2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				8.650.000		8.650.000		8.650.000		8.650.000		30.000.000	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	5	8.650.000	5	8.650.000	5	8.650.000	5	8.650.000	5	30.000.000	
2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	4	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4		4		4		4		4		
2.15.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	4	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	
2.15.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	
2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				161.820.000		161.820.000		161.820.000		161.820.000		502.000.000	
Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	26	161.820.000	29	161.820.000	32	161.820.000	35	161.820.000	39	502.000.000	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2		

2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				111.875.000		111.875.000		111.875.000		111.875.000		111.000.000	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	111.875.000	2	111.875.000	2	111.875.000	2	111.875.000	2	111.000.000	
2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				49.945.000		49.945.000		49.945.000		49.945.000		391.000.000	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	26	49.945.000	29	49.945.000	32	49.945.000	35	49.945.000	39	391.000.000	
2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.573.008.800		5.573.008.800		5.573.008.800		5.573.008.800		5.573.008.800	
Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	5.573.008.800	12	5.573.008.800	12	5.573.008.800	12	5.573.008.800	12	5.573.008.800	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		

2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				54.131.900		54.131.900		54.131.900		54.131.900		54.131.900	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	54.131.900	4	54.131.900	4	54.131.900	4	54.131.900	4	54.131.900	
2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.168.900		61.168.900		61.168.900		61.168.900		61.168.900	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	61.168.900	4	61.168.900	4	61.168.900	4	61.168.900	4	61.168.900	
2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3.299.991.3 00		3.299.991.3 00		3.299.991.3 00		3.299.991.3 00		3.299.991.3 00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	3.299.991.3 00	12	3.299.991.3 00	12	3.299.991.3 00	12	3.299.991.3 00	12	3.299.991.3 00	
2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				38.232.000		38.232.000		38.232.000		38.232.000		38.232.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	38.232.000	4	38.232.000	4	38.232.000	4	38.232.000	4	38.232.000	
2.15.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.045.740.7 00		2.045.740.7 00		2.045.740.7 00		2.045.740.7 00		2.045.740.7 00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	2.045.740.7 00	12	2.045.740.7 00	12	2.045.740.7 00	12	2.045.740.7 00	12	2.045.740.7 00	

2.15.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				58.744.000		58.744.000		58.744.000		58.744.000		58.744.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	58.744.000	12	58.744.000	12	58.744.000	12	58.744.000	12	58.744.000	
2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				237.000.000		237.000.000		237.000.000		237.000.000		237.000.000	
Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	237.000.000	3	237.000.000	3	237.000.000	3	237.000.000	3	237.000.000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	83		95		100		75		78		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	9		9		9		9		9		
2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000		147.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	9	147.000.000	9	147.000.000	9	147.000.000	9	147.000.000	9	147.000.000	
2.15.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	47	83	60.000.000	95	60.000.000	100	60.000.000	75	60.000.000	78	60.000.000	

2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.667.512.1 58		6.667.512.1 58		6.667.512.1 58		6.667.512.1 58		6.667.512.1 58	
Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.667.512.1 58	12	6.667.512.1 58	12	6.667.512.1 58	12	6.667.512.1 58	12	6.667.512.1 58	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.236.999.8 58		2.236.999.8 58		2.236.999.8 58		2.236.999.8 58		2.236.999.8 58	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.236.999.8 58	12	2.236.999.8 58	12	2.236.999.8 58	12	2.236.999.8 58	12	2.236.999.8 58	
2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.430.512.3 00		4.430.512.3 00		4.430.512.3 00		4.430.512.3 00		4.430.512.3 00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4.430.512.3 00	12	4.430.512.3 00	12	4.430.512.3 00	12	4.430.512.3 00	12	4.430.512.3 00	
2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.291.592.0 00		2.291.592.0 00		2.291.592.0 00		2.291.592.0 00		2.291.592.0 00	
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	2.291.592.0 00	33	2.291.592.0 00	33	2.291.592.0 00	33	2.291.592.0 00	33	2.291.592.0 00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	69		75		79		86		90		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	41		41		41		41		41		

	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5		5		5		5		5		
2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.673.126.000		1.673.126.000		1.673.126.000		1.673.126.000		1.673.126.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	41	1.673.126.000	41	1.673.126.000	41	1.673.126.000	41	1.673.126.000	41	1.673.126.000	
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.370.000		124.370.000		124.370.000		124.370.000		124.370.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	69	124.370.000	75	124.370.000	79	124.370.000	86	124.370.000	90	124.370.000	
2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	
2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				381.596.000		381.596.000		381.596.000		381.596.000		381.596.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				71.593.960.394		71.859.336.099		73.250.051.647		74.042.375.500		74.909.690.700	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	0,63	0,63	71.593.960.394	0,65	71.859.336.099	0,65	73.250.051.647	0,67	74.042.375.500	0,67	74.909.690.700	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana				50.000.000		50.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	

Induk Jaringan LLAJ Provinsi													
Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1		2		2		2		2		
2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				25.000.000		25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				25.000.000		25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	25.000.000	2	25.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000	
Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	400	300	9.590.000.000	750	9.590.000.000	850	9.590.000.000	950	9.590.000.000	1.050	9.590.000.000	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	200	200		500		600		700		800		
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	0	4		15		20		25		30		

	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0	11		11		11		11		11	
2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terbangun (Unit)	0	4	250.000.000	15	250.000.000	20	250.000.000	25	250.000.000	30	250.000.000
2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				6.964.550.000		6.964.550.000		6.964.550.000		6.964.550.000		6.964.550.000
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	400	300	6.964.550.000	750	6.964.550.000	850	6.964.550.000	950	6.964.550.000	1.050	6.964.550.000
2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000
2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				2.125.450.000		2.125.450.000		2.125.450.000		2.125.450.000		2.125.450.000
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	200	200	2.125.450.000	500	2.125.450.000	600	2.125.450.000	700	2.125.450.000	800	2.125.450.000
2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B				1.719.310.000		1.719.310.000		3.219.310.000		1.719.310.000		1.719.310.000
Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	5	5	1.719.310.000	5	1.719.310.000	5	3.219.310.000	5	1.719.310.000	5	1.719.310.000
	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	5	20		25		30		35		40	
	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	0	0		0		1		0		0	

	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	4		4	4		4		4		
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)		1		1	1		1		1		
2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B				0		0		1.500.000.000		0		0
Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	0	0
2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B				1.515.560.000		1.515.560.000		1.515.560.000		1.515.560.000		1.515.560.000
Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	5	5	1.515.560.000	5	1.515.560.000	5	1.515.560.000	5	1.515.560.000	5	1.515.560.000
2.15.02.1.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				202.750.000		202.750.000		202.750.000		202.750.000		202.750.000
Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)		1	202.750.000	1	202.750.000	1	202.750.000	1	202.750.000	1	202.750.000
2.15.02.1.03.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	5	20	500.000	25	500.000	30	500.000	35	500.000	40	500.000
2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara (Unit)	3	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	
2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1.069.878.500		1.069.878.500		1.069.878.500		1.069.878.500		1.069.878.500	
Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	6	16	1.069.878.500	12	1.069.878.500	12	1.069.878.500	12	1.069.878.500	12	1.069.878.500	
	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	4	4		5		5		5		5		
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	4	4		4		1		1		1		
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	10	10		10		10		10		10		
2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	6	16	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	

2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	4	4	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				769.978.500		769.978.500		769.978.500		769.978.500		769.978.500	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	12	12	769.978.500	12	769.978.500	12	769.978.500	12	769.978.500	12	769.978.500	
2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	10	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	
2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				99.900.000		99.900.000		99.900.000		99.900.000		99.900.000	
Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	4	4	99.900.000	4	99.900.000	1	99.900.000	1	99.900.000	1	99.900.000	
2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	

Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000
	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	6	6		8		8		10		12	
2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	12	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000
2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000
Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	6	6	25.000.000	8	25.000.000	8	25.000.000	10	25.000.000	12	25.000.000
2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				576.999.800		576.999.800		576.999.800		576.999.800		576.999.800
Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	12	12	576.999.800	12	576.999.800	12	576.999.800	12	576.999.800	12	576.999.800
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	4	4		4		4		4		4	
	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	3		3		3		3		3	

	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	4	4		4		4		4		4		
2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi				29.999.800		29.999.800		29.999.800		29.999.800		29.999.800	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	12	12	29.999.800	12	29.999.800	12	29.999.800	12	29.999.800	12	29.999.800	
2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.15.02.1.07.0010 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	

Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	
2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000		465.000.000	
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	4	4	465.000.000	4	465.000.000	4	465.000.000	4	465.000.000	4	465.000.000	
2.15.02.1.07.0013 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.969.520. 494		58.284.672. 199		56.923.863. 347		58.016.187. 200		58.483.502. 400	
Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	100	100	57.969.520. 494	105	58.284.672. 199	110	56.923.863. 347	115	58.016.187. 200	120	58.483.502. 400	
	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	6	6		6		6	6	6	6	6		
2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	

Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	6	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	
2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.919.520. 494		58.234.672. 199		56.873.863. 347		57.966.187. 200		58.433.502. 400	
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	100	100	57.919.520. 494	105	58.234.672. 199	110	56.873.863. 347	115	57.966.187. 200	120	58.433.502. 400	
2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				49.888.000		49.888.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4	4	49.888.000	4	49.888.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3		1		0		0		0		
2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		0		0		0	

Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.09.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.888.000		24.888.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4	4	24.888.000	4	24.888.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	
2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				74.877.000		49.989.000		600.000.000		500.000.000		600.000.000	
Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	74.877.000	1	49.989.000	1	600.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		0		1		0		0		
2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek				24.888.000		0		200.000.000		0		0	

Antarkota Kewenangan Provinsi													
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.888.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	
2.15.02.1.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				24.992.000		24.992.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.992.000	1	24.992.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	
2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.997.000		24.997.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	24.997.000	2	24.997.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	
2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				49.888.000		25.000.000		100.000.000		350.000.000		400.000.000	

Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	49.888.000	0	25.000.000	0	100.000.000	0	350.000.000	0	400.000.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
2.15.02.1.12.0003 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.888.000		0		0		0		0	
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.12.0004 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		100.000.000		350.000.000		400.000.000	
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	100.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	
2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				128.598.800		128.598.800		250.000.000		400.000.000		450.000.000	

Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	128.598.800	4	128.598.800	4	250.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	
	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	5	5		5		5		5		5		
2.15.02.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				25.000.000		25.000.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000	
Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000	
2.15.02.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				103.598.800		103.598.800		150.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	103.598.800	4	103.598.800	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	

2.15.02.1.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				169.999.800		169.999.800		200.000.000		500.000.000		550.000.000	
Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	169.999.800	4	169.999.800	4	200.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	
2.15.02.1.14.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				169.999.800		169.999.800		200.000.000		500.000.000		550.000.000	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	169.999.800	4	169.999.800	4	200.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	
2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		150.000.000		750.000.000		900.000.000	

Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	150.000.000	4	750.000.000	4	900.000.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	
2.15.02.1.15.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000	
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	

	(Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)													
2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				3.982.897.700		3.997.661.016		4.075.028.964		4.119.107.331		4.167.357.598		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air (Rasio)	0,62	0,62	3.982.897.700	0,62	3.997.661.016	0,63	4.075.028.964	0,63	4.119.107.331	0,64	4.167.357.598	2.15.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				129.615.900		129.615.900		129.615.900		129.615.900		130.000.000		
Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	10	10	129.615.900	10	129.615.900	15	129.615.900	20	129.615.900	20	130.000.000		

2.15.03.1.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				129.615.900	129.615.900	129.615.900	129.615.900	130.000.000				
Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	10	10	129.615.900	10	129.615.900	15	129.615.900	20	129.615.900	20	130.000.000
2.15.03.1.05 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				164.998.900		164.998.900		164.998.900		164.998.900		165.000.000
Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	5	30	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	165.000.000
2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				164.998.900		164.998.900		164.998.900		164.998.900		165.000.000

Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	5	30	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	165.000.000	
2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				100.051.100		100.051.100		100.051.100		100.051.100		100.100.000	
Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	15	30	100.051.100	30	100.051.100	50	100.051.100	50	100.051.100	60	100.100.000	

2.15.03.1.06.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100.051.100		100.051.100		100.051.100		100.051.100		100.100.000	
Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	15	30	100.051.100	30	100.051.100	50	100.051.100	50	100.051.100	60	100.100.000	
2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.588.231.800		3.602.995.116		3.680.363.064		3.724.441.431		3.772.257.598	
Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	9	9	3.588.231.800	0	3.602.995.116	9	3.680.363.064	9	3.724.441.431	9	3.772.257.598	

	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.229.405.000		3.244.168.316		3.321.536.264		3.365.614.631		3.413.430.798	
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	9	9	3.229.405.000	0	3.244.168.316	9	3.321.536.264	9	3.365.614.631	9	3.413.430.798	
2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				358.826.800		358.826.800		358.826.800		358.826.800		358.826.800	
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800	
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390	
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	100	100	30.000.000	100	0	100	30.693.952	100	31.025.959	100	31.389.390	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

2.15.05.1.03 - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390	
Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	0	0	1	30.693.952	1	31.025.959	1	31.389.390	
2.15.05.1.03.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390	
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	0	0	1	30.693.952	1	31.025.959	1	31.389.390	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.3 b**  
**Indikator Kinerja Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,65	0,65	0,67	0,67	
2	Rasio Konektivitas Air	Rasio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1	
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.4**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,76	86,73	90,2	90,03	90,4	90,5	90,6	
3.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	89	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	88,32	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
7.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,51	
8.	Indeks Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Indeks	0	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.	Rasio Konektivitas Provinsi	positif	Rasio	0.649	0.65	0.66	0.82	0.98	1	1	
3.	V/C Ratio di Jalan Provinsi	negatif	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2025

## **BAB V PENUTUP**

Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Bidang/UPTD dan sekretariat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang dapat dijadikan pedoman bagi melaksanakan urusan bidang perhubungan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Bidang/UPTD dan sekretariat di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat.
- 2) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan bidang perhubungan pada pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan kemampuan pendanaan daerah.
- 3) Bidang/UPTD dan Sekretariat dapat melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029
- 4) Untuk penyusunan Renja Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 , yang dilanjutkan menjadi dasar penyusunan Rencana anggaran program kegiatan yang akan diusulkan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya Ranstra tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pogram dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2025-2029 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan menerapkan bebagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas, dan untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

**LAMPIRAN**

# CSF DINAS PERHUBUNGAN

## “Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Sektor Perhubungan ”

Kondisi Yang Diharapkan : Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Kurangnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau
Kurangnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Satuan Kerja	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Satuan Kerja

### Critical Success Factors I

Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau

Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat

Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan

Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretapiian di kewenangan Provinsi

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan anggaran</li><li>- Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan transportasi darat</li><li>- adanya keamanan, kenyamanan , ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan transportasi darat</li><li>- Adanya regulasi yang tepat terkait penyediaan angkutan massal perkotaan</li><li>- Meningkatnya jumlah angkutan umum massal yang dapat melayani masyarakat sampai daerah</li><li>- Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan massal perkotaan</li><li>- Meningkatnya peran Terminal Tipe B untuk mendukung penyediaan prasarana angkutan umum</li></ul>

<p>Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran</li> <li>- Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan transportasi perairan</li> <li>- adanya keamanan, kenyamanan , ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan transportasi perairan</li> <li>- Adanya regulasi yang tepat terkait penyediaan angkutan perairan</li> <li>- Meningkatnya jumlah angkutan umum khususnya angkutan perairan</li> <li>- Meningkatnya peran dermaga untuk mendukung penyediaan prasarana angkutan perairan</li> </ul>
<p>Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan anggaran</li> <li>- Adanya regulasi dan kebijakan perkeretaapian sesuai dengan kewenangan</li> </ul>

Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau

Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat

Ketersediaan anggaran

Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan transportasi darat

adanya keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan transportasi darat

Adanya regulasi yang tepat terkait penyediaan angkutan massal perkotaan

Meningkatnya jumlah angkutan umum massal yang dapat melayani masyarakat sampai daerah

Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan massal perkotaan

Meningkatnya peran Terminal Tipe B untuk mendukung penyediaan prasarana angkutan umum

Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan

Ketersediaan anggaran

Adanya peran serta pemerintah daerah dan pusat dalam ketersediaan transportasi perairan

Adanya keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu dan efektif ketika menggunakan transportasi perairan

Adanya regulasi yang tepat terkait penyediaan angkutan perairan

Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretapiannya di

Ketersediaan anggaran

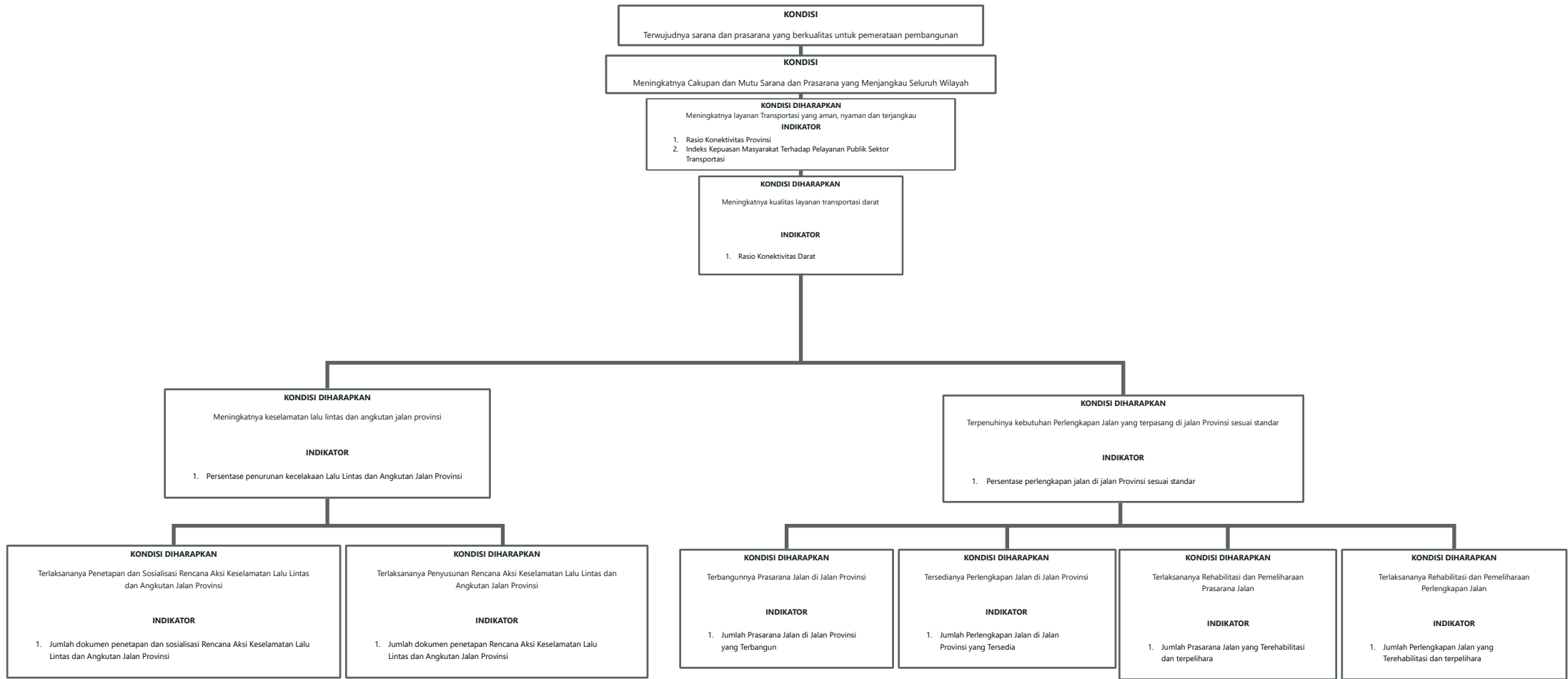
## Critical Success Factors II

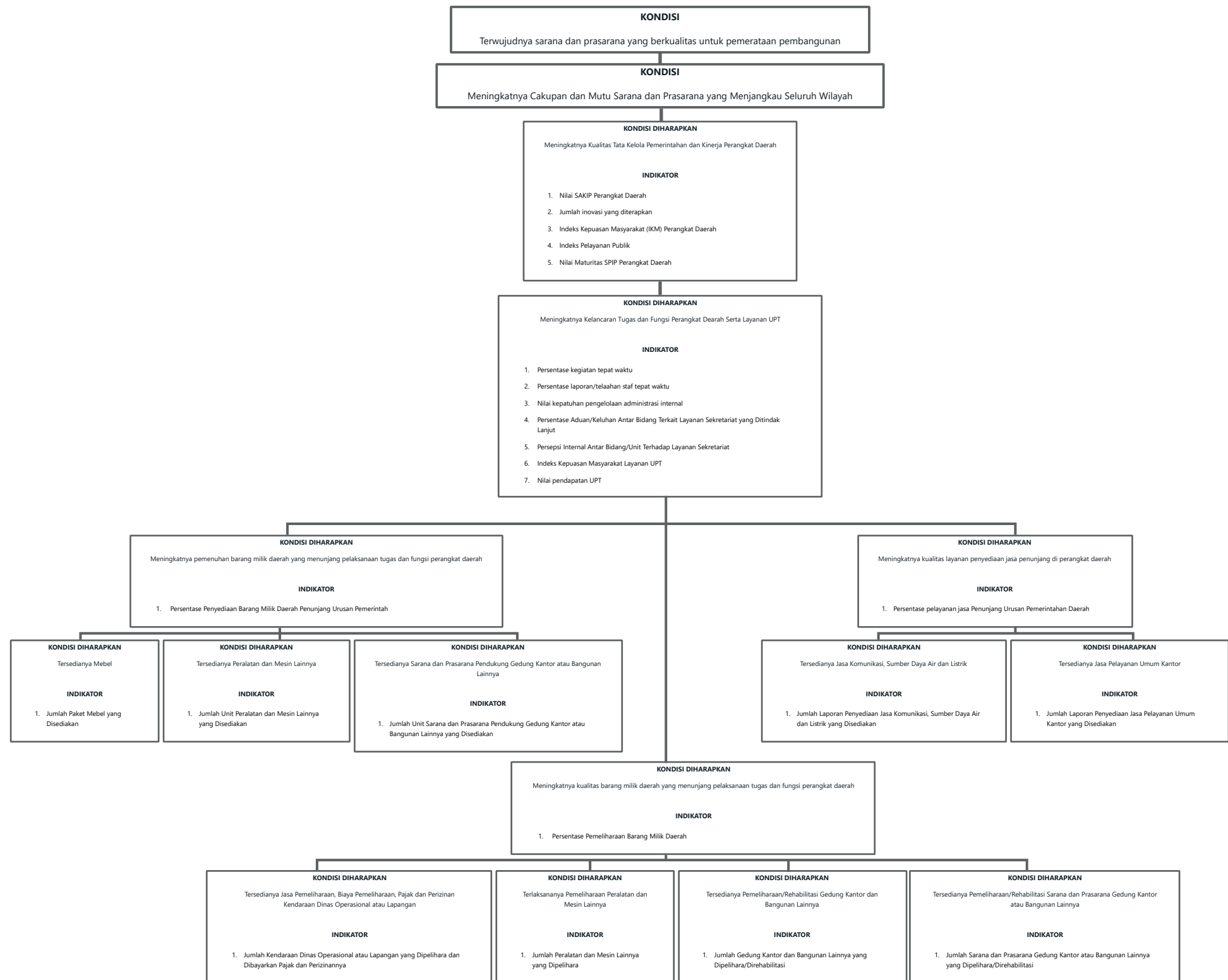
### Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Satuan

Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Layanan UPT

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Layanan UPT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan anggaran</li><li>- Adanya kepatuhan pengelolaan administrasi internal</li><li>- Adanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan</li><li>- Meningkatnya kualitas SDM pada SKPD.</li></ul>







**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Jumlah inovasi yang diterapkan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT

**INDIKATOR**

1. Persentase kegiatan tepat waktu
2. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal
4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT
7. Nilai pendapatan UPT

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya pemenuhan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan penyediaan jasa penunjang di perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Mebel

**INDIKATOR**

1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**INDIKATOR**

1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Provinsi  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Darat

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kelancaran lalu lintas di Jaringan Jalan Provinsi yang berkeselamatan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Provinsi  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Darat

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai standar di Jalan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Provinsi  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Darat

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)  
**INDIKATOR**  
1. Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terkendalinya dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Penetapan Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Ketersediaan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Provinsi Kalimantan Selatan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya penetapan Jaringan Trayek di Provinsi Kalimantan Selatan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Provinsi  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Darat

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan  
**INDIKATOR**  
1. Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Teranalisisnya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terkendalinya dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Provinsi  
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan  
**INDIKATOR**  
1. Rasio Konektivitas Air

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Data Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kelancaran pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Bepa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan  
**INDIKATOR**  
1. Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Bepa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Penetapan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Bepa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
**INDIKATOR**  
1. Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Bepa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau

**INDIKATOR**

1. Rasio Konektivitas Provinsi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretapian di kewenangan Provinsi

**INDIKATOR**

1. Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Kebijakan perencanaan Jaringan jalur kereta api yang menjadi kewenangan provinsi

**INDIKATOR**

1. Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Jumlah inovasi yang diterapkan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT

**INDIKATOR**

1. Persentase kegiatan tepat waktu
2. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal
4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT
7. Nilai pendapatan UPT

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

**INDIKATOR**

1. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Jumlah inovasi yang diterapkan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT

**INDIKATOR**

1. Persentase kegiatan tepat waktu
2. Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal
4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT
7. Nilai pendapatan UPT

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Gaji dan Turjangan ASN

**INDIKATOR**

1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Turjangan ASN

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

**KONDISI**  
Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan

**KONDISI**  
Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Jumlah inovasi yang diterapkan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Nilai Maturlitas SPIP Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT

**INDIKATOR**

1. Persentase kegiatan tepat waktu
2. Persentase laporan/teelaahan staf tepat waktu
3. Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal
4. Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindak Lanjut
5. Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT
7. Nilai pendapatan UPT

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya kualitas pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**INDIKATOR**

1. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**INDIKATOR**

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Meningkatnya tertib administrasi umum perangkat daerah

**INDIKATOR**

1. Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

**INDIKATOR**

1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**INDIKATOR**

1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Bahan Logistik Kantor

**INDIKATOR**

1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

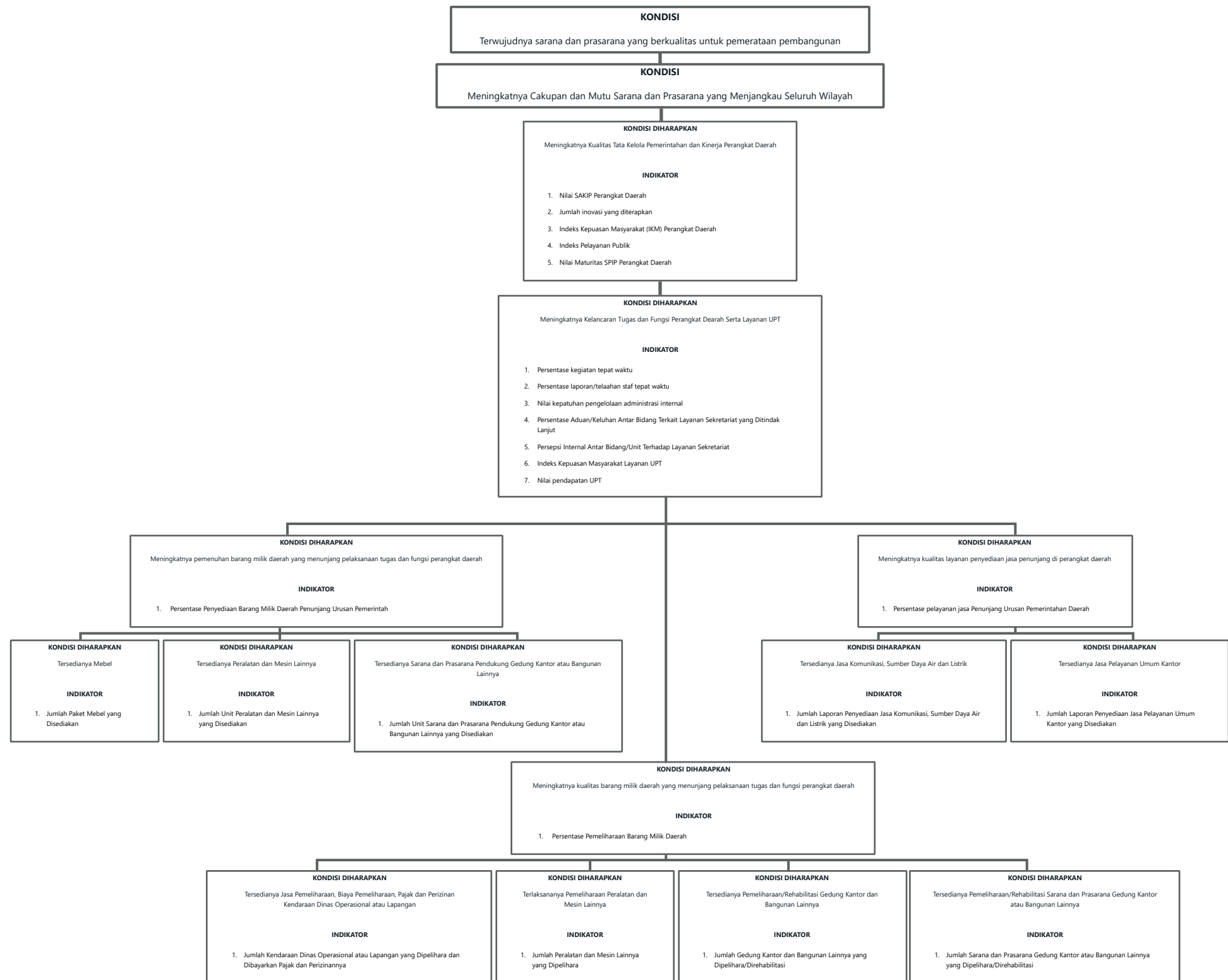
**INDIKATOR**

1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**KONDISI DIHARAPKAN**  
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**INDIKATOR**

1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD



**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>											
- Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan		Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1	
		Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	V/C Ratio di Jalan Provinsi (Nilai)	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)	89	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	82,76	86,73	90,2	90,03	90,4	90,5	90,6	
			Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)	2	2	2	2	2	2	2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka)	88,32	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	0	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,51	
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)	0	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					107.437.953.852		107.806.080.472		109.923.178.230		111.112.184.300		112.413.726.636	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					31.831.095.758		31.949.083.357		32.567.403.667		32.919.675.510		33.305.288.948	
Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Serta Layanan UPT	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	100	31.831.095.758	100	31.949.083.357	100	32.567.403.667	100	32.919.675.510	100	33.305.288.948	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	80	80	80		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	100.000.000	100.000.000	120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					71.593.960.394		71.859.336.099		73.250.051.647		74.042.375.500		74.909.690.700	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	0,63	0,63	0,63	71.593.960.394	0,65	71.859.336.099	0,65	73.250.051.647	0,67	74.042.375.500	0,67	74.909.690.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					3.982.897.700		3.997.661.016		4.075.028.964		4.119.107.331		4.167.357.598	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air (Rasio)	0,62	0,62	0,62	3.982.897.700	0,62	3.997.661.016	0,63	4.075.028.964	0,63	4.119.107.331	0,64	4.167.357.598	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390	
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	100	100	100	30.000.000	100	0	100	30.693.952	100	31.025.959	100	31.389.390	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					<b>107437953852.00</b>		<b>107806080472.00</b>		<b>109923178230.00</b>		<b>111112184300.00</b>		<b>112413726636.00</b>	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>								
- Meningkatnya Cakupan dan Mutu Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan				Rasio Konektivitas Provinsi (Rasio)			
		Meningkatnya layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau			V/C Ratio di Jalan Provinsi (Nilai)			
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)			
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat			Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi			Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	
					Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
					Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		
					Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi		
					Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	2.15.02.1.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
					Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terminal penumpang tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.1.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B (Dokumen)	2.15.02.1.03.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi (Unit)	2.15.02.1.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2.15.02.1.03.0007 - Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
					Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi. (Orang)	2.15.02.1.03.0009 - Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	
					Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2.15.02.1.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase ruas Jalan Provinsi yang dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang berkeselamatan	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0001 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.05.0003 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.05.0005 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan (Unit)	2.15.02.1.05.0007 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
				Persentase Rekomendasi Andalalin yang diterbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	
					Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.1.06.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi (Laporan)	2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
				Persentase Sarana Prasarana keselamatan LLAJ sesuai Standar di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.07.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.1.07.0005 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Dokumen)	2.15.02.1.07.0008 - Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
					Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.1.07.0010 - Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) (Lokasi)	2.15.02.1.07.0011 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
					Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Dokumen)	2.15.02.1.07.0013 - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
				Persentase ketersediaan Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar Untuk Mengangkut (Orang/Barang)	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.08.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.09.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12.0003 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.12.0004 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	
				Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	2.15.02.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.14.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	
				Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.02.1.15.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan		Rasio Konektivitas Air (Rasio)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
				Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	
					Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	2.15.03.1.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.03.1.05 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Rekomendasi Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.1.06 - Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	
					Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.03.1.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Persentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi sesuai Standar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
				Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	2.15.05.1.03 - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	2.15.05.1.03.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
					Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)		
		Meningkatnya Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah Serta Layanan UPT			Persentase kegiatan tepat waktu (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai pendapatan UPT (Rp)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.15.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.15.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.15.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pelayanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
1	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,63	0,63	0,63	0,65	0,65	0,67	0,67	
2	Rasio Konektivitas Air	Rasio	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,64	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1	
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	













BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				124.370.000		124.370.000		124.370.000		124.370.000		124.370.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	23	69	124.370.000	75	124.370.000	79	124.370.000	86	124.370.000	90	124.370.000		
2.15.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000	5	112.500.000		
2.15.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				381.596.000		381.596.000		381.596.000		381.596.000		381.596.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000	33	381.596.000		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				71.593.960.394		71.859.336.099		73.250.051.647		74.042.375.500		74.909.690.700		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio Konektivitas Darat (Rasio)	0,63	0,63	71.593.960.394	0,65	71.859.336.099	0,65	73.250.051.647	0,67	74.042.375.500	0,67	74.909.690.700	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.02.1.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				50.000.000		50.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Persentase penurunan kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1		2		2		2		2			
2.15.02.1.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				25.000.000		25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.15.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi				25.000.000		25.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Dokumen)	1	1	25.000.000	2	25.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000		
2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000		9.590.000.000		
Persentase perlengkapan jalan di jalan Provinsi sesuai standar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia (Unit)	400	300	9.590.000.000	750	9.590.000.000	850	9.590.000.000	950	9.590.000.000	1.050	9.590.000.000		
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	200	200		500		600		700		800			
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun (Unit)	0	4		15		20		25		30			
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	0	11		11		11		11		11			









BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				57.919.520.494		58.234.672.199		56.873.863.347		57.966.187.200		58.433.502.400		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Unit)	100	100	57.919.520.494	105	58.234.672.199	110	56.873.863.347	115	57.966.187.200	120	58.433.502.400		
2.15.02.1.09 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				49.888.000		49.888.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Persentase Dokumen Kebijakan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4	4	49.888.000	4	49.888.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3		1		0		0		0			
2.15.02.1.09.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		0		0		0		
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	3	3	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.15.02.1.09.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.888.000		24.888.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	4	4	24.888.000	4	24.888.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
2.15.02.1.10 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				74.877.000		49.989.000		600.000.000		500.000.000		600.000.000		
Persentase Penetapan Jaringan trayek di Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	74.877.000	1	49.989.000	1	600.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.1.10.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				24.888.000		0		200.000.000		0		0		
Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.888.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0		
2.15.02.1.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				24.992.000		24.992.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.992.000	1	24.992.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
2.15.02.1.10.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.997.000		24.997.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	24.997.000	2	24.997.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000		
2.15.02.1.12 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				49.888.000		25.000.000		100.000.000		350.000.000		400.000.000		
Persentase Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan wilayah operasinya melampaui daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	49.888.000	0	25.000.000	0	100.000.000	0	350.000.000	0	400.000.000		
	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.15.02.1.12.0003 - Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				24.888.000		0		0		0		0		
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	24.888.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.15.02.1.12.0004 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi				25.000.000		25.000.000		100.000.000		350.000.000		400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	100.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000		
2.15.02.1.13 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				128.598.800		128.598.800		250.000.000		400.000.000		450.000.000		
Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang di terbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	128.598.800	4	128.598.800	4	250.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000		
	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.15.02.1.13.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				25.000.000		25.000.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		
Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan (Unit)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	250.000.000		
2.15.02.1.13.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi				103.598.800		103.598.800		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	103.598.800	4	103.598.800	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		
2.15.02.1.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				169.999.800		169.999.800		200.000.000		500.000.000		550.000.000		
Persentase Rekomendasi izin usaha angkutan taksi provinsi yang diterbitkan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	169.999.800	4	169.999.800	4	200.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000		
2.15.02.1.14.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi				169.999.800		169.999.800		200.000.000		500.000.000		550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi (Laporan)	4	4	169.999.800	4	169.999.800	4	200.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000		
2.15.02.1.15 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				75.000.000		75.000.000		150.000.000		750.000.000		900.000.000		
Nilai Kepuasan Masyarakat dan Operator penyedia angkutan terhadap tarif kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	75.000.000	4	75.000.000	4	150.000.000	4	750.000.000	4	900.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4		4		4							
	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4		4		4							
2.15.02.1.15.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000		
2.15.02.1.15.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000		
2.15.02.1.15.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				25.000.000		25.000.000		50.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				3.982.897.700		3.997.661.016		4.075.028.964		4.119.107.331		4.167.357.598		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	Rasio Konektivitas Air (Rasio)	0,62	0,62	3.982.897.700	0,62	3.997.661.016	0,63	4.075.028.964	0,63	4.119.107.331	0,64	4.167.357.598	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.03.1.02 - Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				129.615.900		129.615.900		129.615.900		129.615.900		130.000.000		
Persentase Rekomendasi izin penyelenggaraan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat dalam Provinsi Kalimantan Selatan diterbitkan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	10	10	129.615.900	10	129.615.900	15	129.615.900	20	129.615.900	20	130.000.000		
2.15.03.1.02.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				129.615.900		129.615.900		129.615.900		129.615.900		130.000.000		
Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan (Unit)	10	10	129.615.900	10	129.615.900	15	129.615.900	20	129.615.900	20	130.000.000		
2.15.03.1.05 - Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				164.998.900		164.998.900		164.998.900		164.998.900		165.000.000		
Persentase ketersediaan Data jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan untuk Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	5	30	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	165.000.000		
2.15.03.1.05.0003 - Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				164.998.900		164.998.900		164.998.900		164.998.900		165.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	5	30	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	164.998.900	10	165.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				3.229.405.000		3.244.168.316		3.321.536.264		3.365.614.631		3.413.430.798		
Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan (Unit)	9	9	3.229.405.000	0	3.244.168.316	9	3.321.536.264	9	3.365.614.631	9	3.413.430.798		
2.15.03.1.10.0008 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				358.826.800		358.826.800		358.826.800		358.826.800		358.826.800		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800	4	358.826.800		
<b>2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390		
Tersedianya Kebijakan Jaringan Perkeretaapian di kewenangan Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian (Persentase)	100	100	30.000.000	100	0	100	30.693.952	100	31.025.959	100	31.389.390	2.15.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PERHUBUNGAN	
2.15.05.1.03 - Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390		
Persentase Perencanaan Jaringan Perkeretaapian yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	0	0	1	30.693.952	1	31.025.959	1	31.389.390		
2.15.05.1.03.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi				30.000.000		0		30.693.952		31.025.959		31.389.390		
Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringanya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan (Dokumen)	1	1	30.000.000	0	0	1	30.693.952	1	31.025.959	1	31.389.390		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN</b>				
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.1.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			2.15.02.1.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
			2.15.02.1.08 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.15.02.1.08.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
2.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi Perairan	2.15.03.1.10 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.15.03.1.10.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,76	86,73	90,2	90,03	90,4	90,5	90,6	
3.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	89	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	88,32	90	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
6.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	0	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,51	
7.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Angka	0	3	3,09	3,18	3,3	3,45	3,6	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.	Rasio Konektivitas Provinsi	positif	Rasio	0,649	0,65	0,66	0,82	0,98	1	1	
3.	V/C Ratio di Jalan Provinsi	negatif	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	